

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) dipahami sebagai konsensus global yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Agenda ini mencakup 17 tujuan utama serta 169 target spesifik yang diproyeksikan untuk dicapai dalam kurun waktu 15 tahun (2015–2030). Diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kerangka kerja ini didesain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan manusia sekaligus menjaga kelestarian bumi. Implementasi SDGs bersifat universal bagi seluruh negara, namun negara-negara maju memikul beban tanggung jawab moral yang lebih besar dalam merealisasikan target-target tersebut (Pristiwasia, 2021).



Gambar 1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: *Website ruangkota.com* (2023)

Ketujuh belas poin dalam agenda SDGs pada gambar tersebut mencakup spektrum pembangunan yang luas dan terintegrasi. Fokus utamanya meliputi pengentasan kemiskinan dan kelaparan, serta penjaminan akses terhadap kesehatan dan pendidikan berkualitas. Agenda ini juga memprioritaskan kesetaraan gender, ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta energi terjangkau. Aspek ekonomi dan lingkungan turut menjadi perhatian melalui target pekerjaan layak, inovasi industri, kota berkelanjutan, konsumsi yang bertanggung jawab, hingga penanganan perubahan iklim. Selain itu, pilar perdamaian, keadilan, dan kemitraan global menjadi fondasi penutup. Esensi utama SDGs adalah menghapus kemiskinan, mereduksi ketimpangan, serta menjaga ekologi (Pristiwasa, 2021).

Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperkuat kepemimpinan dan meningkatkan kerja sama di antara berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat peran industri pariwisata dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan untuk tahun 2030. Berbeda dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang mengambil pendekatan lebih terpusat, pengembangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melibatkan proses kolaboratif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan yang berbeda. Pemangku kepentingan ini meliputi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas akademis. Selain itu, lebih dari 8,5 juta masukan dari individu di seluruh dunia telah diintegrasikan ke dalam pengembangan tujuan dan indikator SDGs (Pristiwasa, 2021).

Keberadaan industri pariwisata sangat erat kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang menekankan prinsip memastikan bahwa tidak ada yang terpinggirkan. Sesuai dengan prinsip ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) minimal harus mampu menangani dua aspek utama. Pertama, konsep keadilan prosedural berkaitan dengan sejauh mana semua individu, terutama mereka yang berasal dari komunitas terpinggirkan, dapat berpartisipasi secara penuh dan inklusif dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Kedua, konsep keadilan substantif berkaitan dengan seberapa baik kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan dapat secara memadai mengatasi dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh komunitas, terutama yang mempengaruhi kelompok rentan dan terpinggirkan. Pariwisata, dalam kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terkait dengan pilar pertama yang berfokus pada pengentasan kemiskinan; pilar kedelapan yang berkaitan dengan pekerjaan yang layak dan pembangunan ekonomi; serta pilar ketujuh belas yang membahas kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kehadiran industri pariwisata dalam memfasilitasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung (Pristiwasa, 2021).

Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang berkembang pesat dan memiliki potensi signifikan dalam menciptakan peluang kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prasodjo, 2017). Pariwisata juga dimaknai sebagai kegiatan yang melibatkan interaksi erat antara penyelenggara wisata (*host*) dan wisatawan (*guest*). Meskipun sering

dianggap kurang penting dalam praktiknya, pemahaman terhadap perbedaan budaya tidak dapat diabaikan. Dalam konteks pariwisata, adanya ekspektasi budaya yang saling sejalan antara *host* dan *guest* dapat menciptakan suasana yang mendukung bagi industri pariwisata. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan signifikan dalam ekspektasi budaya, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan baik bagi wisatawan (*guest*) maupun penyelenggara wisata (*host*) (Swesti, 2019).

Pertumbuhan industri pariwisata sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan berbagai bidang pembangunan. Tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Andi dalam Handayani dan Warsono, 2017). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam industri pariwisata dikenal sebagai pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pertumbuhan ekowisata diproyeksikan akan memberikan manfaat besar bagi komunitas lokal dan berperan sebagai kekuatan utama dalam kemajuan ekonomi di wilayah tersebut. Tujuan utama inisiatif ini adalah memastikan bahwa wilayah dengan potensi alam yang terjaga dapat mencapai keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan. Selain itu, pertumbuhan ekowisata harus memastikan bahwa komunitas lokal memperoleh manfaat yang berkelanjutan (Primono dalam Surojia, dkk., 2022). Pembangunan ekowisata yang efektif harus memastikan pengalaman yang memuaskan bagi wisatawan untuk mempertahankan bisnis ekowisata. Selain itu, perkembangan ini harus mampu menumbuhkan rasa aman dan nyaman, meningkatkan kepuasan, dan memperbaiki pengalaman keseluruhan bagi pengunjung (Fandeli dalam Surojia, dkk., 2022).

Ekowisata merupakan sebuah konsep memandu wisatawan ke daerah terpencil dengan tujuan untuk mengapresiasi dan mengeksplorasi alam, sejarah, dan budaya (Khanra dkk., 2021; Liu dan Li, 2020). Menurut Jaya dkk. dalam Tamrin dkk. (2024), konsep ini telah berkembang menjadi metode strategis untuk meningkatkan mata pencaharian yang berkelanjutan dan mengasumsikan peran penting dalam pengelolaan masyarakat lokal. Di Indonesia, ekowisata tumbuh subur di daerah pedesaan yang memiliki karakteristik lingkungan yang masih asri dan harmonis (Roziqin dkk., 2019; Roziqin dan Syarafina, 2021). Berdasarkan data yang dilaporkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (2024), jumlah kunjungan wisatawan Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dilaporkan pada bulan Januari 2023 bahwa jumlah wisatawan ke Indonesia sebesar 798.469 orang, angka ini naik pada bulan Januari 2024 yang berjumlah 927.746 orang. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan ekowisata yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan dan perkembangan sehingga diikuti oleh peningkatan jumlah wisatawan. Data lebih lengkap mengenai jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2023 hingga 2024 tersaji pada grafik di bawah ini.



Gambar 1.2. Data Kunjungan Wisatawan Indonesia (Januari 2023-2024)
Sumber: Kemenparekraf, diolah kembali oleh Penulis (2024)

Berdasarkan data resmi yang dipublikasikan di atas, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia pada Januari 2024 mencapai 927.746 kunjungan. Dari total tersebut, 760.036 kunjungan atau 81,93% tercatat melalui sistem imigrasi, sementara 167.710 kunjungan atau 18,07% diperoleh melalui pencatatan Mobile Positioning Data di wilayah perbatasan. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 16,19% dibandingkan Januari 2023 yang mencatat 798.468 kunjungan. Merujuk laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (2024), lima negara penyumbang kunjungan terbesar pada periode tersebut meliputi Malaysia dengan 155.213 kunjungan, Australia 127.097 kunjungan, Singapura 87.248 kunjungan, Tiongkok 81.691 kunjungan, dan Timor Leste 55.324 kunjungan. Selain itu, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara yang meninggalkan Indonesia pada Januari 2024 tercatat sebesar 7,92 malam, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada pada angka 7,41 malam. Temuan ini menggambarkan bahwa sektor pariwisata Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setiap tahunnya, baik dari segi jumlah kedatangan wisatawan maupun dalam aspek pengelolaannya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kunjungan wisatawan lokal di Indonesia pada tahun 2024, terdapat 5 provinsi dengan jumlah kunjungan terbanyak. Kategori ini didasarkan pada jumlah kunjungan wisatawan lokal ke setiap provinsi yang ada di Indonesia. Berikut ini data jumlah perjalanan wisatawan lokal (nusantara) menurut provinsi tujuan (perjalanan).

Tabel 1.1. Perjalanan Wisatawan Lokal Menurut Provinsi Tujuan

No.	Provinsi	Jumlah Kunjungan
1	Jawa Timur	218.711.818
2	Jawa Barat	167.396.804
3	Jawa Tengah	146.842.040
4	DKI Jakarta	87.233.238
5	Banten	48.257.848

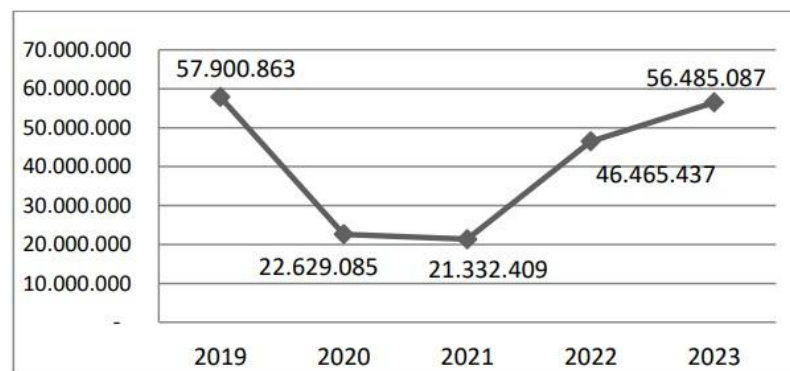
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025) pada Tabel 1.1., terlihat dominasi mutlak Pulau Jawa dalam peta pariwisata nasional. Tiga provinsi mencatatkan angka kunjungan di atas 100 juta, dengan Jawa Timur memimpin sebagai destinasi terpopuler yang melampaui 200 juta kunjungan. Fenomena ini menegaskan posisi strategis Pulau Jawa, meskipun tercatat sebagai wilayah dengan densitas populasi tertinggi di Indonesia, ia tetap menjadi magnet utama pariwisata. Menurut Annafi dan Megawati (2024), tingginya animo wisatawan ini tidak lepas dari dukungan infrastruktur yang mumpuni dan konektivitas yang baik. Selain itu, variasi atraksi wisata yang komprehensif di Jawa menjadi katalisator bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk terus berkunjung.

Salah satu provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah adalah provinsi yang terletak di Pulau Jawa dan memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Provinsi ini menawarkan berbagai destinasi wisata dengan daya tarik yang kuat. Secara administratif, Jawa Tengah terbagi menjadi enam kota dan 29 kabupaten, di mana masing-masing wilayah memiliki karakteristik geografis yang berbeda, sehingga membentuk keunikan serta potensi wisata yang beragam (Annafi dan Megawati, 2024). Jawa Tengah adalah provinsi yang menarik lebih dari 100 juta pengunjung, seperti yang tercantum dalam Tabel 1.1. Jawa Tengah memiliki lokasi strategis karena terletak di wilayah padat penduduk di Pulau Jawa, berbatasan dengan dua

provinsi besar: Jawa Barat di barat dan Jawa Timur di timur. Selain itu, provinsi ini berbatasan di utara dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Laut Jawa. Jawa Tengah mencakup luas wilayah sekitar 34.548 km², yang meliputi sekitar 28,94% dari total luas Pulau Jawa, termasuk Kepulauan Karimunjawa (Mustofa dan Haryati, 2018).

Adanya potensi wisata yang beragam di Jawa Tengah, mendorong para wisatawan lokal (nusantara) untuk berkunjung ke daerah-daerah yang ada di bagian dari Jawa Tengah. Terdapat tren peningkatan kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut ini data kunjungan wisatawan lokal (nusantara) tahun 2019-2023 di Jawa Tengah.

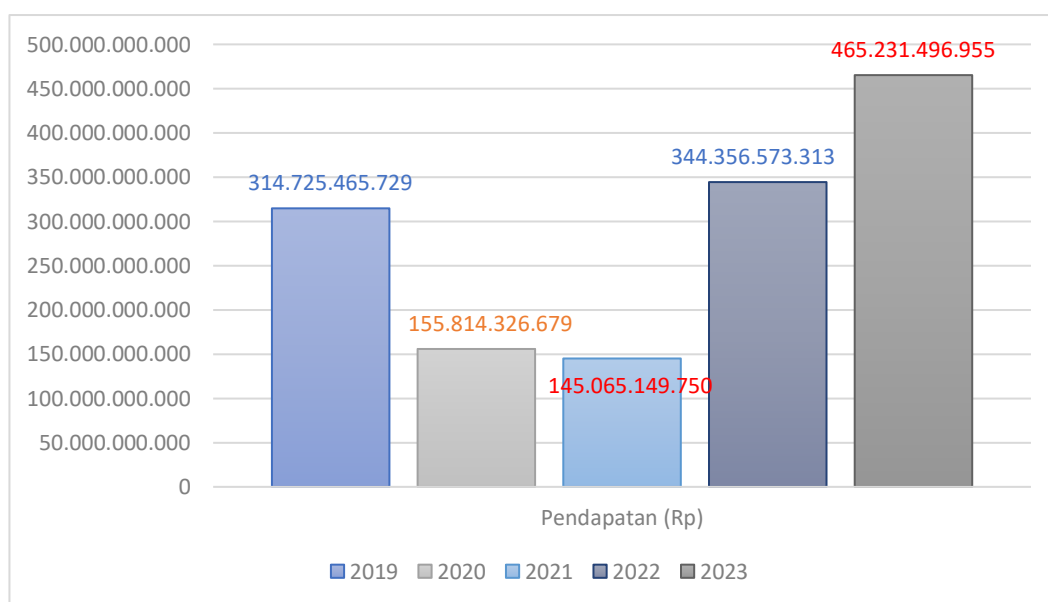


Gambar 1.3. Kunjungan Wisatawan Nusantara di Jawa Tengah Pada Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah (2024)

Informasi yang ditampilkan dalam grafik menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Jawa Tengah bervariasi setiap tahun. Berdasarkan informasi yang diberikan, peningkatan jumlah wisatawan tetap stabil, kecuali pada periode 2020 hingga 2021 yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa destinasi wisata di Jawa Tengah tetap sangat populer di kalangan wisatawan lokal.

Berkembangnya sektor pariwisata di Provinsi Jawa Tengah, maka secara tidak langsung akan berdampak pada pembangunan sarana dan prasarana di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena pariwisata menjadi salah satu penyumbang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mustofa dan Haryati, 2018). Di Jawa Tengah sendiri, pendapatan dari pariwisata meningkat setiap tahunnya. Berikut ini data pendapatan dari pariwisata.



Gambar 1.4. Pendapatan Jawa Tengah dari Sektor Pariwisata
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah (2024)

Data dalam gambar 1.4 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah dari sektor pariwisata terus meningkat setiap tahun. Namun, pada periode 2020 hingga 2021, terjadi penurunan akibat wabah Covid-19. Peningkatan pendapatan ini tentu didukung oleh wisatawan yang datang mengunjungi destinasi di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempromosikan pariwisata di kabupaten/kotanya dengan menerapkan Rencana Aksi Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan periode 2024-2026. Pariwisata

berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama dari rencana aksi daerah Jawa Tengah ini.

Menurut kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah, jumlah wisatawan lokal/nusantara dan mancanegara menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing kabupaten/kota tersebut. Berikut ini data 10 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan jumlah wisatawan dan pendapatannya.

Tabel 1.2. Pendapatan Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Pada Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Wisatawan		Pendapatan (Rp)
		Nusantara (lokal)	Manca negara	
1	Klaten	6.293.175	163.882	194.179.450.098
2	Kabupaten Semarang	3.531.786	2.344	52.317.875.166
3	Purbalingga	2.482.974	7	33.255.108.890
4	Banjarnegara	1.779.430	-	32.498.952.936
5	Surakarta	4.019.566	10.120	31.981.547.599
6	Kebumen	2.036.275	-	16.290.389.925
7	Cilacap	1.292.702	-	12.468.466.500
8	Boyolali	964.785	1.348	10.362.819.511
9	Rembang	1.846.108	26	9.800.012.059
10	Temanggung	582.727	37	8.243.068.579

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah (2024)

Jika dilihat berdasarkan tabel di atas, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jawa Tengah masih terbilang sangat sedikit. Meskipun begitu, wisatawan nusantara (lokal) mendominasi kunjungan wisata yang ada di Jawa Tengah. Hal ini juga meningkatkan pendapatan dari daerah-daerah kabupaten/kota tersebut sehingga pembangunan nantinya juga akan ikut berkembang. Dengan begitu, pemerintah Jawa Tengah maupun kota/kabupaten harus terus berupaya mendukung perkembangan sektor pariwisata yang berada di daerahnya, hal ini akan sangat menunjang untuk keberlangsungan pembangunan yang ada di daerah.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu yang masuk ke dalam 10 besar dengan pendapatan dari sektor pariwisata tertinggi di Jawa Tengah. Jika dilihat dari tabel pendapatan dari pariwisata tersebut, Kabupaten Rembang memiliki jumlah wisatawan yang lebih banyak dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Boyolali, akan tetapi pendapatannya berada di bawah daerah-daerah tersebut. Hal ini artinya walaupun kunjungan wisatawan tinggi, tetapi pendapatan yang didapatkan belum tentu sebanding dengan jumlah wisatawan tersebut. Terdapat indikator lain yang memengaruhi adanya pendapatan daerah dari pariwisata, selain jumlah wisatawan.

Kabupaten Rembang adalah sebuah wilayah yang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan memiliki potensi wisata pesisir yang sangat kaya. Kawasan ini menawarkan berbagai macam destinasi wisata yang memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Keberadaan wilayah ini yang strategis diperkuat dengan aksesibilitas melalui Jalan Pantai Utara Jawa (Pantura), yang melintasi Kabupaten Rembang. Jalur ini mempermudah perjalanan menuju berbagai objek wisata di daerah tersebut dan semakin memperkuat posisi Kabupaten Rembang sebagai kawasan penting di bagian timur laut Provinsi Jawa Tengah. Potensi ini membuka peluang besar bagi Kabupaten Rembang untuk mengembangkan sektor pariwisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Inayah dkk., 2024).

Legitimasi Kabupaten Rembang dalam mengelola potensi wisatanya didasarkan pada amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjut, kerangka teknis pengembangan sektor ini dituangkan

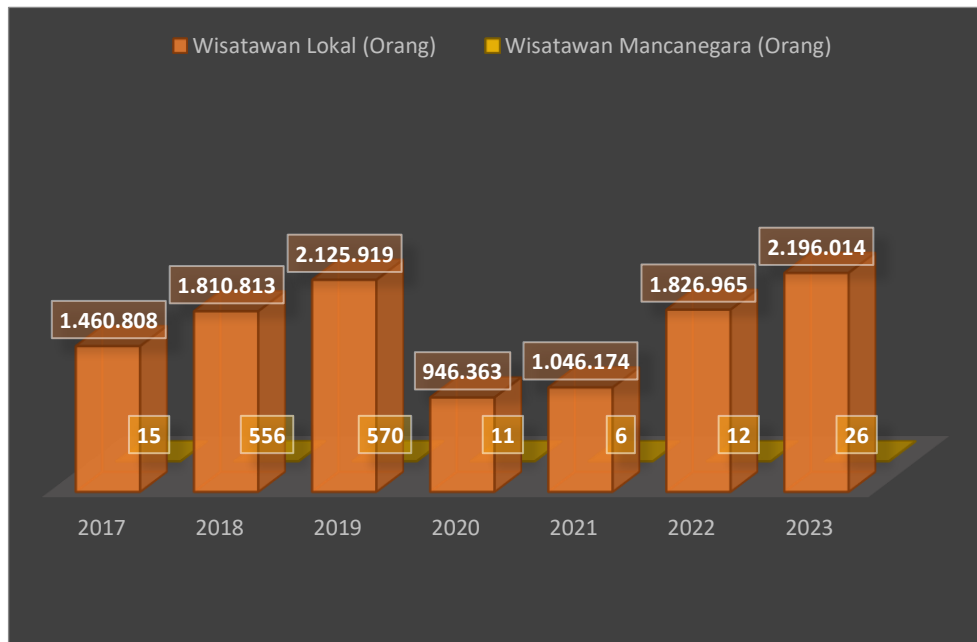
dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPAR) Kabupaten Rembang periode 2019-2025. Merujuk pada Pasal 1 Ayat (5) regulasi tersebut, pariwisata didefinisikan sebagai spektrum aktivitas wisata yang didukung oleh ketersediaan fasilitas serta layanan, yang penyelenggaraannya melibatkan sinergi antara masyarakat, sektor swasta, dan Pemerintah Daerah. Hal ini terbukti bahwa Kabupaten Rembang mengelola pariwisatanya dengan perencanaan yang matang. Objek wisata di Kabupaten Rembang sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam jumlahnya sehingga hal ini juga menambah jumlah wisatawan. Berikut ini data jumlah objek wisata di Kabupaten Rembang.

Tabel 1.3. Data Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Rembang

No.	Kategori	2020	2021	2022
1	Objek Wisata Budaya	2	2	2
2	Objek Wisata Bahari	10	11	11
3	Objek Wisata Cagar Alam	3	3	3
4	Objek Wisata Alam	2	3	4
5	Objek Wisata Sejarah	8	8	8
6	Objek Wisata Religi	4	4	4
7	Objek Wisata Pendidikan	3	3	3
8	Objek Wisata Kuliner	3	4	5
9	Objek Wisata Belanja	1	1	1
10	Objek Wisata Buatan	10	10	10
Jumlah		46	49	51

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam Inayah dkk. (2024)

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa objek wisata di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun, yang berkontribusi pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Berikut ini data kunjungan wisatawan di Kabupaten Rembang baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara.



Gambar 1.5. Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal dan Mancanegara di Kabupaten Rembang (2017-2023)

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang (2024)

Wisatawan yang datang ke Kabupaten Rembang berdasarkan data tersebut didominasi oleh wisatawan nusantara (lokal). Wisatawan yang berasal dari mancanegara belum secara signifikan berkunjung ke Kabupaten Rembang. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Rembang juga telah dikenal oleh banyak wisatawan baik itu secara lokal maupun mancanegara. Pemerintah Kabupaten Rembang masih memiliki tugas untuk terus meningkatkan potensi wisatanya, apalagi untuk menarik wisatawan mancanegara agar banyak berkunjung, seperti pada tahun 2018-2019 yang paling banyak wisatawan dari mancanegara berkunjung ke Rembang.

Menurut informasi yang dilansir dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Rembang (23 April 2024), perkembangan objek wisata ini menjadikan Kabupaten Rembang menduduki peringkat ketiga dalam hal jumlah kunjungan wisatawan terbanyak di antara 33 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang yang merujuk pada laporan Dinas

Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (30 Maret hingga 21 April 2024), Kabupaten Rembang berada di posisi ketiga setelah Kota Semarang dan Klaten. Kota Semarang tercatat menerima 462.192 kunjungan wisatawan, sementara Klaten berada di posisi kedua dengan 375.433 kunjungan (*Website Pemkab Rembang*, 2024). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang juga menyampaikan bahwa beberapa objek wisata di daerah ini memberikan kontribusi terbesar terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Berikut adalah data sepuluh objek wisata yang paling banyak dikunjungi di Kabupaten Rembang.

Tabel 1.4. 10 Objek Wisata dengan Kunjungan Terbanyak di Kabupaten Rembang (Januari – September 2025)

No.	Objek Wisata	Jumlah Kunjungan (Wisatawan)
1	Pantai Karang Jahe	450.862 orang
2	Pantai Pasir Putih Wates	301.139 orang
3	Pantai Balongan	226.252 orang
4	Kajoran <i>Water Boom</i>	89.209 orang
5	Puri Berlian <i>Park</i>	82.746 orang
6	Pantai Caruban	71.946 orang
7	Pasar Brumbung	69.361 orang
8	Sarine	66.307 orang
9	Masjid Jami' Lasem	58.308 orang
10	Pasujudan Sunan Bonang	55.643 orang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang (2025)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat Pantai Karang Jahe menyumbang kunjungan wisatawan tertinggi, yaitu 450.862 pengunjung. Posisi kedua ditempati Pantai Pasir Putih Wates dengan 301.139 pengunjung, disusul Pantai Balongan sebanyak 226.252 pengunjung. Destinasi wisata alam masih memiliki kunjungan tertinggi di antara lainnya. Artinya, Kabupaten Rembang ini memiliki keunggulan komparatif pada sektor wisata pesisir. Dominasi objek wisata pantai tersebut memperlihatkan bahwa potensi bahari Rembang menjadi daya tarik utama dalam struktur pariwisata daerah. Salah satu destinasi yang mengalami perkembangan

signifikan ialah Pantai Pasir Putih Wates. Walaupun pantai ini tergolong baru, yaitu baru dibuka untuk wisatawan pada tahun 2016, pantai ini tidak kalah dengan Pantai Karang Jahe yang dibuka terlebih dahulu pada tahun 2013 (Wibowo dalam *linimedia.com*, 2020).

Menurut penelitian sebelumnya, masih ada tantangan dalam tata kelola ekowisata, termasuk peran pemangku kepentingan kebijakan dari sektor pemerintah dan swasta, pemerataan manfaat, penilaian biaya sosial, dan lingkungan di sektor terkait (Nunkoo, 2017; Tamrin dan Lubis, 2023). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa banyak tantangan yang dihadapi para pendukung ekowisata, termasuk kurangnya kesadaran, terbatasnya kepemimpinan masyarakat, masalah komitmen organisasi, lemahnya dedikasi operator pariwisata, sumber daya keuangan dan ekonomi yang tidak memadai, jaringan yang tidak efisien, dan terbatasnya pengetahuan tentang industri pariwisata (Halkier dkk., 2019; Hatma Indra Jaya dkk., 2022; Wu, 2021). Guna mengoptimalkan efektivitas sektor pariwisata, Becken dan Loehr (2022), menyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola yang konsisten dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik merupakan hal yang penting.

Perkembangan sektor pariwisata tidak dapat dipisahkan dari peran aktif para pemangku kepentingan, yang meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Rahim, 2012:1). Menurut Rahmi dalam Alamsyah (2016), terdapat tiga pemangku kepentingan utama yang memiliki peran krusial dalam pengembangan pariwisata, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Peran pemangku kepentingan ini sangat penting dalam memajukan pariwisata, karena tanpa keterlibatan mereka,

pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah tidak dapat berlangsung secara optimal. Keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan memungkinkan perencanaan strategi pariwisata yang dapat diterima dengan baik oleh semua pihak, mengurangi potensi konflik dalam pelaksanaan kebijakan, serta menyatukan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sektor pariwisata (Wanner, 2019).

Alonso (2015) mengemukakan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) memiliki hubungan yang erat dengan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Firdaus dalam (Destiana dkk., 2020) menambahkan bahwa penguatan peran pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang, baik dari segi ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Wanner dalam (Destiana dkk., 2020) juga menyatakan bahwa partisipasi aktif para pemangku kepentingan sangat berperan dalam merumuskan perencanaan strategi pariwisata yang dapat diterima secara luas, mengurangi potensi konflik dalam pelaksanaan kebijakan, serta menyatukan berbagai pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam sektor pariwisata. Sinergi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan di dalam suatu destinasi pariwisata dapat menghasilkan produk wisata yang berkualitas, membangun citra destinasi yang kuat, serta meningkatkan daya saing dan keunggulan jangka panjang untuk pengembangan destinasi yang berkelanjutan (Miočić dalam Destiana dkk., 2020). Peran pemangku kepentingan (*stakeholders*) menjadi sangat penting dalam merancang strategi yang mencerminkan berbagai

kepentingan dan dalam mengembangkan sistem pengelolaan yang efektif guna mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

Pantai Pasir Putih Wates merupakan salah satu pantai yang terdapat di Kabupaten Rembang. Memiliki lokasi yang hanya sekitar 10 km dari pusat kota. Meskipun belum terlalu terkenal seperti Pantai Karang Jahe, pantai ini tidak kalah dalam menarik wisatawan. Setidaknya ada 70-100 ribu pengunjung setiap bulannya yang mendatangi pantai ini (*Website Pemprov Jateng*, 2020). Pantai Pasir Putih Wates ini juga mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya, yaitu memiliki pasir yang putih sesuai dengan namanya dan banyak sekali pohon cemara yang tumbuh di pinggir pantai.

Pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates memiliki potensi strategis dalam mendukung peningkatan sektor pariwisata daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan destinasi tersebut masih dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural, terutama yang berkaitan dengan peran dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, pengelola destinasi, dan masyarakat lokal belum sepenuhnya menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendorong pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah berdampak pada belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, termasuk fasilitas umum, dan aksesibilitas sehingga menghambat daya tarik dan kualitas destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates (Inayah dkk., 2024). Pada laporan APBD 2024, terdapat ketidaksesuaian angka pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) untuk tahun 2023, yang seharusnya

tercatat sebesar Rp66.250.000.000, tetapi kenyataannya hanya tercatat sekitar Rp19 miliar. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya kebutuhan belanja yang belum dianggarkan selama 12 bulan, yang menyebabkan defisit anggaran sekitar Rp90 miliar (*Suaramerdeka.com*, 2024). Situasi ini tentu saja mempengaruhi pengembangan sektor pariwisata di daerah tersebut. Artinya, peran pemerintah daerah Kabupaten Rembang yang belum optimal, khususnya dalam aspek perencanaan dan pengelolaan anggaran. Di dalam situasi fiskal yang defisit dan tidak stabil tersebut, sektor pariwisata, termasuk pengembangan Pantai Pasir Putih Wates, tidak mendapat prioritas anggaran yang memadai sehingga menghambat perkembangan destinasi wisatanya.

Selain permasalahan sumber daya, lemahnya koordinasi dan kesamaan persepsi antar *stakeholder* juga menjadi kendala utama dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates. Tidak seluruh pihak pengelola memahami secara utuh arah, tujuan, dan standar kebijakan pengembangan pariwisata, yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan pandangan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta belum optimalnya komunikasi lintas organisasi menyebabkan peran *stakeholder* berjalan secara parsial dan belum terintegrasi. Kondisi ini berdampak pada belum tercapainya tujuan dari pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates yang efektif serta berdaya saing (Inayah dkk., 2024).

Penelitian oleh Inayah dkk. (2024) juga menyebutkan bahwa infrastruktur primer di destinasi Pantai Pasir Putih ini masih tergolong layak, tetapi aspek sanitasi dan kebersihan masih menuntut atensi lebih. Urgensi peremajaan fasilitas juga

terlihat pada wahana rekreasi anak, termasuk ayunan, area santai, serta Jembatan Dermaga Cinta. Di sisi lain, sarana penunjang seperti musala, toilet, dan area parkir sebenarnya memadai dalam kondisi normal, tetapi kerap mengalami kelebihan kapasitas (*overload*) saat musim liburan akibat lonjakan wisatawan.

Zulfa dan Falaq (2024) mengemukakan bahwa meskipun Pantai Pasir Putih Wates memiliki potensi wisata yang signifikan, tingkat keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi aktif dalam sektor pariwisata sehingga peran masyarakat sebagai *stakeholder* utama belum optimal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kontribusi masyarakat dalam peningkatan kualitas layanan wisata, pengelolaan destinasi, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

Selain itu, permasalahan peran *stakeholder* tercermin dari belum optimalnya sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam mendukung pengembangan destinasi. Zulfa dan Falaq (2024) menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, serta strategi promosi yang masih minim menunjukkan lemahnya koordinasi dan dukungan antar pemangku kepentingan. Pemerintah desa dan *stakeholder* terkait belum sepenuhnya mampu menyediakan fasilitas pendukung yang memadai maupun mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal secara berkelanjutan sehingga potensi wisata yang dimiliki belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat lokal.

Hasil penelitian Nikmah (2024) juga memperkuat permasalahan peran *stakeholders* pada pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates yang terletak pada belum optimalnya sinergi dan koordinasi antar aktor yang terlibat. Meskipun pengelolaan destinasi telah melibatkan masyarakat, pemerintah desa, serta tim pengelola secara aktif, peran masing-masing *stakeholder* masih cenderung berjalan parsial dan berfokus pada kepentingan sektoral. Pengelolaan wisata lebih didominasi oleh inisiatif masyarakat dan pengelola lokal, sementara peran pemerintah daerah belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan dan pengembangan jangka panjang, khususnya dalam aspek kebijakan strategis dan dukungan pembangunan fisik. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga formal seperti BUMDes dan dinas terkait belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai instrumen penguatan kelembagaan dan peningkatan nilai ekonomi destinasi. Pengelolaan pendapatan wisata yang bersumber dari retribusi parkir dan aktivitas ekonomi kawasan lebih banyak difokuskan untuk operasional dan pengembangan internal destinasi, sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana berskala besar, karena destinasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pembiayaan dan perencanaan pembangunan daerah.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi ketidakefektifan peran *stakeholder* adalah aspek komunikasi dan koordinasi internal. Penelitian Nikmah (2024) mengungkap adanya kecenderungan sebagian aktor pengelola yang belum sepenuhnya memandang dirinya sebagai bagian dari satu sistem organisasi,

sehingga memunculkan perbedaan pandangan dan potensi konflik kepentingan. Minimnya ruang partisipasi bagi BUMDes dalam pengambilan keputusan strategis juga menyebabkan gagasan pengembangan yang lebih inovatif dan berorientasi keberlanjutan belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengembangan Pantai Pasir Putih Wates telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, peran *stakeholder* secara keseluruhan masih memerlukan penguatan koordinasi, integrasi kebijakan, dan tata kelola yang lebih kolaboratif.

Stakeholders yang terlibat dalam pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates belum maksimal dalam menjalankan perannya. Berbagai *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates belum sepenuhnya saling mendukung dan masih kurang dalam koordinasi dan komunikasinya. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan struktural dan kelembagaan dalam tata kelola pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian “Mengapa Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang belum Optimal?”

1.2. Identifikasi Masalah

1. Komunikasi antar *stakeholders* dalam pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates sering kali bertentangan sehingga terjadi kesalahpahaman.
2. Koordinasi yang dilakukan antar *stakeholders* belum berjalan secara terstruktur sehingga pembagian peran dan tanggung jawab menjadi tumpang tindih dalam pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates.

3. Tingkat keterlibatan *stakeholder* (masyarakat) yang masih rendah dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Siapa saja *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana peran *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang?
3. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat peran *stakeholders* dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang.
2. Menganalisis peran *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang.
3. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat ketidakefektifan peran *stakeholders* dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang tercantum dalam studi ini, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan berbagai keuntungan yang dapat dirasakan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik secara teori maupun praktik, sehingga penelitian yang dilakukan akan bermanfaat. Beberapa penerapan dari hal ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik mempelajari peran pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah dan pengetahuan di bidang ilmu administrasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, memperdalam pemahaman berdasarkan pengalaman peneliti, serta memberikan masukan yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di kawasan Pantai Pasir Putih Wates, Kabupaten Rembang.

1. Bagi Aktor Pemerintah

Penelitian ini mengenai pengembangan pariwisata di Pantai Pasir Putih Wates, Kabupaten Rembang, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi seluruh aktor pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk bahan evaluasi dalam rangka memperbaiki pelaksanaan

tugas dan fungsi para aktor pemerintah terkait, guna meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pariwisata di daerah tersebut.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam pengembangan pariwisata di daerah. Masyarakat akan lebih memahami kontribusi mereka sehingga dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperluas pemahaman dan wawasan mengenai peran pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan para peneliti mampu melakukan analisis serta mengaplikasikan konsep-konsep yang diperoleh secara teoritis selama perkuliahan ke dalam praktik nyata.

1.6. Kajian Pustaka

1.6.1. Penelitian terdahulu

Tabel penelitian terdahulu di bawah ini menunjukkan bahwa terdapat penelitian-penelitian lain yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Namun, tabel ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan tidak mengandung unsur plagiasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 1.5. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis, Judul Artikel (Penelitian), dan Tahun Terbit	Teori yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Grace Ginting, Kismartini, Tri Yuniningsih & Teuku Afrizal (2021) Judul: Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan Pariwisata Siosar.	Rahmi (dalam Alamsyah 2016), pengembangan pariwisata ada tiga <i>stakeholder</i> yang sangat berperan penting, yaitu: 1) Pemerintah 2) Swasta 3) Masyarakat	Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi tinjauan pustaka (<i>literature review</i>).	Peran para <i>stakeholder</i> baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat belum berjalan optimal dalam mendorong pengembangan destinasi wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum memberikan kontribusi yang memadai, sektor swasta belum mampu menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan kawasan wisata Siosar masih terbatas.
2	Ni'mah A.Hidayah, Simon S. Hutagalung, dan Dedy Hermawan (2019) Judul: Analisis Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial	Klasifikasi <i>stakeholder</i> menurut Townsley dalam Wakka (2014:50), yaitu: <i>Stakeholder</i> primer dan <i>Stakeholder</i> sekunder. Peran <i>stakeholder</i> menurut Bryson dalam Hadiyansyah	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.	Pengembangan Wisata Talang Air melibatkan beragam <i>stakeholder</i> , termasuk Pokdarwis dan Karang Taruna sebagai aktor utama, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi sebagai pendukung kebijakan, masyarakat Pajaresuk sebagai penentu konteks sosial, serta Bank Lampung sebagai pihak pendukung finansial.

No.	Nama Penulis, Judul Artikel (Penelitian), dan Tahun Terbit	Teori yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu.	(2012:190), didapatkan beberapa peran <i>stakeholder</i> , yaitu: <i>Contest setter, Players, Subject, Crowd</i> .		
3	Elvis Salouw (2021) Judul: Implementasi Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan Pariwisata (Studi Kasus pada Kepulauan Banda).	<i>Stakeholders</i> dapat diidentifikasi dalam dua sektor yaitu <i>public</i> dan <i>private</i> . <i>Public sector</i> dalam hal ini terdiri dari pemerintah. Sedangkan, <i>private sector</i> , yaitu sektor swasta serta masyarakat (Nuryanti & Hwang, 2002).	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan interpretasi sejarah.	Meskipun seluruh <i>stakeholder</i> telah berperan, efektivitasnya masih terbatas. Pemerintah sebagai otoritas utama belum menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga memengaruhi respons sektor swasta. Rendahnya kunjungan ulang wisatawan menandai belum maksimalnya kinerja pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi.
4	Alesandro Pendong, Frans Singkoh, Fanley Pangemanan (2020) Judul: Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Payung Di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.	Santoso (2011:14), melihat peran pemerintah dalam unsur pengembangan pariwisata, antara lain: a) Atraksi atau daya tarik, b) Transportasi, c) Akomodasi, d) Fasilitas pelayanan atau penyediaan fasilitas, e) Tersedianya infrastruktur	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Pemerintah desa dan masyarakat meningkatkan akses wisatawan ke Gunung Payung melalui transportasi lokal, menyediakan akomodasi rumah warga, serta membangun fasilitas dasar seperti toilet dan area parkir sebelum jalur pendakian.
5	Ni Putu Tiya Paristha, I Nyoman Sukma Arida, Gde Indra Bhaskara (2022) Judul: Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar.	Pendekatan oleh kementerian pariwisata Indonesia dengan model <i>pentahelix</i> : 1) Akademisi 2) Pemerintah 3) Komunitas 4) Bisnis	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.	Seluruh <i>stakeholder</i> telah berperan dalam pengembangan Desa Wisata Kerta, namun kontribusi sektor bisnis dalam penyediaan barang dan jasa serta keterlibatan media masih rendah. Pola kemitraan yang terbentuk menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama, mengingat komunitas desa menjadi

No.	Nama Penulis, Judul Artikel (Penelitian), dan Tahun Terbit	Teori yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		5) Media		penggerak sentral dalam operasional dan pengembangan desa wisata.
6	Matheus Gratiano Mali (2021) Judul: Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Era <i>New Normal</i> Di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Aplikasi <i>Visiting</i> Jogja.	Menurut Sondang P. Siagian (2009:132) peranan pemerintah, seperti: 1) fungsi pengaturan, 2) fungsi perumusan berbagai jenis kebijakan, 3) fungsi pelayanan, serta 4) fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.	Penelitian dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif.	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berupaya maksimal dalam mempromosikan dan mengembangkan pariwisata sebagai bagian dari pemulihan di masa pandemi. Salah satu inovasinya adalah aplikasi <i>Visiting Jogja</i> yang dikembangkan oleh Dinas Pariwisata DIY sebagai sarana adaptasi pariwisata berbasis protokol kesehatan, termasuk untuk pelacakan data pengunjung sebagai <i>Covid-19 tracer</i> .
7	Risa Amalia Kurniawati, Natasya Shaherani, Basuhnamei Lena Leopold Coutrier, Hawa Sukmawati (2022) Judul: Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengembangan Pantai Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi Sebagai Destinasi Wisata Bahari.	<i>Stakeholder</i> dibagi menjadi dua fase, yaitu primer (terkait langsung dengan perusahaan) dan sekunder (tidak terkait langsung) (Freeman et al., 2007).	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Ekonomi pariwisata Pantai Pulau Merah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kuliner, penginapan, pemandu, dan persewaan wisata. Pemerintah memperkuat SDM, mengelola <i>homestay</i> , dan melakukan promosi, sementara swasta mendukung aksesibilitas, pemberdayaan, promosi, serta program CSR untuk fasilitas dan pelestarian lingkungan.
8	Annatasya Yunita Nugroho, Amni Zarkasyi Rahman, Kismartini (2022)	<i>Stakeholders</i> diklasifikasikan berdasarkan perannya dalam suatu program (Nugroho dkk., 2014), antara lain:	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif.	Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit melibatkan lima peran stakeholder: <i>policy creator</i> (DISBUDPAR, Bappeda, DISPORAPAR) menetapkan kebijakan; koordinator (Pokdarwis, Kelurahan, Bappeda)

No.	Nama Penulis, Judul Artikel (Penelitian), dan Tahun Terbit	Teori yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Judul: Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang.	1) <i>Policy Creator</i> 2) Koordinator 3) Fasilitator 4) Implementor 5) Akselerator		menyinkronkan program; fasilitator menyediakan sarana, pelatihan, dan asistensi; <i>implementor</i> mengeksekusi program; serta akselerator (Pokdarwis, universitas, wisatawan, masyarakat) mendorong percepatan melalui partisipasi dan inovasi.
9	Mahardhika Berliandaldo, Achmad Chodiq, Driszal Fryantoni (2021) Judul: Kolaborasi dan Sinergitas Antar <i>Stakeholder</i> dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong.	Freeman dkk. (2007) membagi pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>), yaitu <i>Stakeholders</i> primer dan <i>Stakeholders</i> sekunder. Menurut Bryson (2004), peran <i>stakeholders</i> didasarkan kepentingan dan pengaruh, di antaranya: 1) Subyek (<i>Subjects</i>). 2) Pemain Kunci (<i>Key Players</i>). 3) Pengikut Lain (<i>Crowd</i>). 4) Pendukung (<i>Contest Setters</i>).	Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Identifikasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan pariwisata di Kebun Raya Cibinong menunjukkan adanya dua kelompok utama, yaitu <i>stakeholder</i> primer (LIPI dan Pemerintah Kabupaten Bogor) serta <i>stakeholder</i> sekunder (Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Mitra Pengelola Kebun Raya, dan Pelaksana TJSL Kabupaten Bogor). Hasil analisis lebih lanjut mengelompokkan mereka ke dalam empat kategori peran: Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai <i>subject</i> , LIPI sebagai <i>key player</i> , Kementerian PUPR, Dinas PUPR, dan Pelaksana TJSL sebagai <i>followers</i> , serta Mitra Pengelola Kebun Raya sebagai <i>supporters</i> .
10	Endah Dwi Lestari, Yoseb Boari, Melyanus Bonsapia, Silas Marcelino Anes (2023)	Pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata pada kawasan wisata (Kuncoro, 2004), sebagai:	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.	Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mendorong perkembangan sektor pariwisata daerah. Upaya tersebut mencakup

No.	Nama Penulis, Judul Artikel (Penelitian), dan Tahun Terbit	Teori yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Judul: Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor	1) Koordinator 2) Fasilitator 3) Stimulator 4) Motivator		program pengembangan destinasi, peningkatan pemasaran pariwisata, penguatan kemitraan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung, sehingga daya tarik wisata di wilayah ini semakin berkembang.
11	Vivi Alvianita, Ari Subowo, R. Slamet Santoso (2024) Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara.	1) <i>Stakeholders</i> dibagi menjadi tiga kelompok menurut Crosby (1992), yaitu <i>stakeholder</i> primer, <i>stakeholder</i> kunci, dan <i>stakeholder</i> sekunder. 2) Peran <i>Stakeholder</i> : Menurut Nugroho dkk., (2014) <i>stakeholders</i> memiliki peran sebagai <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator, <i>implementor</i> , dan Akselerator	Metode penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif deskriptif.	Pengembangan pariwisata Dieng melibatkan tiga kelompok <i>stakeholder</i> : primer (masyarakat Dieng Kulon, Pokdarwis), kunci (Disparbud, UPTD Kawasan Wisata, Pemerintah Desa), dan sekunder (Kementerian PUPR, BPCB, Perhutani, perbankan, PT Geodipa, perguruan tinggi, media). Peran mereka berlapis sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, dan akselerator, menunjukkan kolaborasi multi-aktor dalam percepatan pengembangan kawasan wisata.
12	Zam Zam Masrurun, Dyah Meutia Nastiti (2023) Judul: Analisis <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Wonosobo.	Kategorisasi <i>stakeholders</i> menurut Bryson (2004) dapat dibagi menjadi: 1) <i>Key player</i> 2) <i>Subject</i> 3) <i>Context setter</i> 4) <i>Crowd</i>	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.	Analisis menunjukkan pemangku kepentingan pengembangan kawasan terbagi empat: <i>key player</i> (Dinas Pariwisata & Kebudayaan Wonosobo, Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata Jateng, Bappeda Wonosobo) dengan pengaruh dan kepentingan tertinggi; <i>subject</i> (Pokdarwis Dieng Pandhawa, Perhutani, BI, PLN, Geodipa, PT Tambi) berkepentingan tapi berpengaruh terbatas; <i>context</i>

No.	Nama Penulis, Judul Artikel (Penelitian), dan Tahun Terbit	Teori yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<i>setter</i> (Kementerian Pariwisata, BKSDA, BPCB Jateng, Dinas PUPR) berpengaruh besar tapi kepentingannya tidak langsung; dan <i>crowd</i> (pemerintah kecamatan, perangkat daerah, pelaku usaha, media, lembaga pendidikan, LSM, komunitas lokal) berperan umum tanpa pengaruh strategis..
13	Penulis: Afifah Dina Fatin, Florensia Devina, Moh. Musleh (2024) Judul: Kolaborasi <i>Stakeholder</i> Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Wisata Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.	Menurut Calzada (2016) dalam (Halibas, Sibayan, & Maata, 2017), terdapat 5 (lima) pilar <i>stakeholder</i> , di antaranya: 1) Pemerintah 2) Pengusaha 3) Akademisi 4) Masyarakat Madani 5) Media Massa	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif.	Desa Wisata Pandean dikelola berbasis peran masyarakat dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan media. Pengembangan fokus pada pelestarian budaya dan pemanfaatan potensi alam secara partisipatif, dengan produk utama paket wisata dan homestay, meski pengelolaan dan aksesibilitas homestay masih kurang optimal.
14	Nova Irene Bernedeta Sitorus (2020) Judul: Peran dan Kolaborasi <i>Stakeholder</i> Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisata Di Kawasan Danau Toba.	Menurut Rahim (2012:1), pengembangan kepariwisataan melibatkan adanya 3 (tiga) <i>stakeholder</i> , yaitu: 1) Pemerintah 2) Swasta 3) Masyarakat	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif	Pengembangan pariwisata Danau Toba belum optimal karena partisipasi stakeholder terbatas, anggaran minim, dan kapasitas SDM rendah; kolaborasi antar kabupaten tergantung inisiasi pemerintah provinsi, sehingga peran pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha perlu ditingkatkan.
15	Jodi Hariawan, Yusri Abdillah, Luchman Hakim (2020)	Rahim (2012), menyebutkan pengembangan pariwisata	Metode penelitian yang digunakan,	Pemerintah Lombok Utara menetapkan Masjid Kuno Bayan Beleq sebagai destinasi wisata budaya dengan pengembangan sarana, SDM, dan promosi. Swasta

No.	Nama Penulis, Judul Artikel (Penelitian), dan Tahun Terbit	Teori yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Judul: Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengembangan Kawasan Masjid Kuno Bayan Beleg Sebagai Destinasi Wisata Warisan Budaya.	melibatkan tiga <i>stakeholder</i> terkait: 1) Pemerintah 2) Swasta 3) Masyarakat	yaitu kualitatif deskriptif.	mendukung melalui pelatihan, modal perajin, dan layanan transportasi, masyarakat berperan sebagai pengelola dan pelaku usaha, sementara perguruan tinggi memberikan penelitian, pengabdian, dan pendampingan.
16	Umi Muawanah, Nendah Kurniasari, Permana Ari Soejarwo, dan Christina Yuliaty (2020) Judul: Peran, Kepentingan <i>Stakeholder</i> Dan Dukungan Kebijakan Dalam Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Budaya Bahari Di Malaumkarta, Kabupaten Sorong.	Amalyah, Hamid, & Hakim (2016), <i>stakeholders</i> wisata bahari berupa: a) Pemerintah b) Pelaku pariwisata c) Masyarakat lokal Amanah & Utami (2006), pengembangan wisata bahari terdapat beberapa <i>stakeholders</i> yang terlibat, yaitu: a) Nelayan b) Pemerintah lokal c) Lembaga Swadaya Masyarakat d) <i>Private sector</i>	Metode penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif.	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa <i>stakeholder</i> yang mempunyai kepentingan dalam mendukung kesiapan kelembagaan dalam meningkatkan nilai tambah wisata bahari berbasis budaya bahari di Kabupaten Sorong. Beberapa <i>stakeholder</i> tersebut, yaitu Dinas Pariwisata, Lembaga Adat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Loka Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut (LPSP) Sorong, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, dan Dewan Adat Desa.
17	Loetvy Wahyuningtiyas & Doddy Aditya Iskandar (2023)	Berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya, <i>stakeholder</i> diklasifikasikan menjadi empat golongan (Bryson, 2004), yaitu: 1) <i>Key players</i>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus.	Pengelolaan TWA Kawah Ijen, peran para <i>stakeholder</i> teridentifikasi dalam empat kategori utama. Pertama, <i>policy creator</i> yang bertanggung jawab menyusun kebijakan dan arahan strategis bagi pengembangan kawasan. Kedua, <i>implementer</i> yang melaksanakan

No.	Nama Penulis, Judul Artikel (Penelitian), dan Tahun Terbit	Teori yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Judul: Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen.	2) <i>Context setters</i> 3) <i>Subjects</i> 4) <i>Crowd</i> Wahyuningtiyas dan Iskandar (2023), mengklasifikasikan peran <i>stakeholder</i> sebagai berikut: 1) <i>Policy creator</i> 2) Implementor 3) Fasilitator 4) Konservator		kebijakan tersebut melalui program dan kegiatan operasional di lapangan. Ketiga, fasilitator yang menyediakan dukungan berupa sarana, prasarana, serta kemudahan koordinatif guna memperlancar aktivitas pengelolaan. Keempat, konservator yang berperan menjaga kelestarian lingkungan, termasuk perlindungan kawasan hutan, sumber daya air, dan stabilitas ekosistem belerang. Keempat peran ini saling melengkapi sehingga membentuk kerangka pengelolaan kawasan yang terpadu dan berorientasi pada keberlanjutan.
18	Fahad Mursyid Jannata, Aufarul Marom, Herbasuki Nurcahyanto (2023) Judul: Analisis Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang.	Viney dalam Suwitri (2011), <i>stakeholders</i> dapat dipilah ke dalam 4 kategori yaitu: 1) Primer 2) Sekunder 3) Tersier 4) Kwarter Teori Peran <i>Stakeholders</i> Menurut Nugroho dalam Handayani (2017) peran aktor diklasifikasikan menjadi lima, yaitu: 1) <i>Policy Creator</i>	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Faktor pendukung dan penghambat pengembangan Desa Wisata Jatirejo mencakup empat aspek: nilai, komunikasi, kepercayaan, dan kebijakan. Pada aspek nilai, dukungan muncul melalui penerapan musyawarah dan gotong royong oleh Lurah Jatirejo, sementara rendahnya minat dan keseriusan sebagian warga menjadi hambatan. Pada aspek komunikasi, pertemuan Forum Komunikasi “Si Barista” menjadi katalis koordinasi, namun komunikasi yang kurang intens antara kelurahan dan masyarakat memicu kesalahpahaman. Pada aspek kepercayaan, pelatihan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meningkatkan inovasi kuliner, tetapi lemahnya kepedulian masyarakat menghambat perkembangan. Pada aspek

No.	Nama Penulis, Judul Artikel (Penelitian), dan Tahun Terbit	Teori yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		2) Koordinator 3) Fasilitator (<i>Facilitator</i>) 4) Pelaksana (Implementor) 5) Akselerator (<i>Accelerator</i>)		kebijakan, adanya SK Wali Kota Semarang No. 556/819 Tahun 2017 menjadi pendukung penting dalam penetapan dan arah pengembangan desa wisata.
19	Siska Ita Selvia, Ayu Fitriatul Ulya, Ni Made Wirastika Sari, Sri Mulyawati (2024) Judul: Analisis Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengembangan Desa Agrowisata Kebon Ayu.	Andayani (2017), membagi <i>stakeholder</i> menjadi tiga kategori: 1) <i>Stakeholder</i> kunci 2) <i>Stakeholder</i> primer 3) <i>Stakeholder</i> sekunder Wakka (2014), mengklasifikasikan empat kepentingan dan pengaruhnya, yaitu: 1) <i>Stakeholder</i> sebagai Subjek 2) <i>Stakeholder</i> kunci 3) <i>Stakeholder</i> pengikut 4) <i>Stakeholder</i> pendukung	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.	Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemangku kepentingan yang berada dalam kategori <i>key player</i> , yakni pihak dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang sama-sama tinggi, mencakup Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Pemerintah Desa Kebon Ayu, Pokdarwis, Kelompok Tani, BUMDes, UMKM, serta akademisi. Selanjutnya, pihak yang berperan sebagai subjek utama dalam pengembangan Desa Agrowisata Kebon Ayu meliputi masyarakat desa, Karang Taruna, dan lembaga adat Saling Periri, yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata tersebut.
20	Sintia Diah Kusuma, Herbasuki Nurcahyanto, Aufarul Marom (2022) Judul: Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Upaya Pengembangan Desa	Menurut Maryono dalam Handayani (2017), <i>stakeholder</i> ada tiga kelompok, yaitu: 1) <i>Stakeholder</i> Kunci 2) <i>Stakeholder</i> Primer 3) <i>Stakeholder</i> Sekunder	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif.	Pada konteks pengembangan Desa Wisata Cempaka, pemangku kepentingan utama meliputi Pokdarwis Cempaka, sektor swasta (termasuk BUMN dan perusahaan), serta akademisi dari institusi pendidikan tinggi. <i>Stakeholder</i> ini dianggap sebagai aktor yang memiliki pengaruh signifikan serta kepentingan yang

No.	Nama Penulis, Judul Artikel (Penelitian), dan Tahun Terbit	Teori yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Wisata Dengan Menggunakan Kerangka <i>Pentahelix</i> .	Kepentingan dan pengaruh <i>stakeholder</i> menurut Thompson dalam Handayani (2017), yaitu: 1) Subyek (<i>subjects</i>) 2) Pemain kunci (<i>key players</i>) 3) Pengikut lain (<i>crowd</i>) 4) Pendukung (<i>contest setters</i>)		krusial dalam upaya pengembangan desa wisata tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, setiap pemangku kepentingan telah melaksanakan perannya sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki. Namun, terdapat beberapa pihak yang belum mengoptimalkan peranannya secara maksimal. Salah satunya adalah Pemerintah Desa Cempaka, yang perlu meningkatkan perhatian terhadap keberlanjutan sektor pariwisata di wilayahnya.
21	Kismartini Kismasrtini, Ali Roziqin, dan Naila Authori (2023) Judul: <i>A stakeholder analysis for sustainable development of Maritime Village in Semarang coastal community, Indonesia.</i>	Klasifikasi <i>Stakeholder</i> (Clarkson, 1995), meliputi: 1) <i>Stakeholder</i> utama 2) <i>Stakeholder</i> primer 3) <i>Stakeholder</i> sekunder Bryson (2004), memetakan <i>stakeholder</i> berdasarkan kewenangannya, yaitu: 1) <i>Stakeholder</i> kunci 2) <i>Stakeholder</i> pendukung 3) Subjek 4) Pengikut lain	Metode penelitian menggunakan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program Pengembangan Kampung Bahari terutama ditentukan oleh <i>key players</i> , yakni Kementerian PUPR dan Bappeda Kota Semarang, yang memiliki kewenangan dan kepentingan terbesar sehingga memegang peran strategis sebagai perumus kebijakan, koordinator, fasilitator, dan pelaksana program. Sementara itu, pemangku kepentingan non-kunci seperti Kementerian BUMN dan PT Pelabuhan Indonesia berperan sebagai fasilitator dan akselerator yang mendukung kelancaran implementasi, namun pengaruhnya tidak sebesar aktor utama.
22	Sitti Hadijah, Ritabulan, Nuraeni, Muhammad Rizky Prawira (2021)	Bryson (2004), dengan 4 (empat) kategori <i>stakeholder</i> sebagai berikut: 1) <i>Stakeholder</i> Subjek	Metode penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata melibatkan 22 pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten,

No.	Nama Penulis, Judul Artikel (Penelitian), dan Tahun Terbit	Teori yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Judul: <i>Mapping Stakeholder's Role in Community-Based Tourism Development on Hutan Bambu Alu in Polewali Mandar, Indonesia.</i>	2) <i>Stakeholder</i> kunci 3) <i>Stakeholder</i> penentu 4) <i>Stakeholder</i> pengikut		pemerintah kecamatan dan desa, hingga lembaga teknis seperti BPDAS-HL. Selain itu, aktor lokal seperti pemilik lahan bambu, kelompok masyarakat, pelaku budaya Sureq Bolong, pengrajin bambu Pamboang, dan fasilitas kesehatan setempat juga turut berperan dalam mendukung aktivitas pariwisata di kawasan tersebut.
23	Rahmawati Rahmawati, Hartuti Purnaweni, Hardi Warsono, Tri Yuniningsih (2025) Judul: <i>Identification and mapping of stakeholder roles in the development of local wisdom-based tourism villages in Cikolelet tourism village, Serang, Indonesia.</i>	Menurut Nugroho dalam Alfiya (2023), pemangku kepentingan dapat berperan sebagai: Pembuat kebijakan, Koordinator, Fasilitator, Pelaksana, Akselerator Byrd dan Gustke (2011), <i>stakeholder</i> dalam pariwisata adalah: Penduduk, Pemilik usaha, Pejabat pemerintah, Pengunjung	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.	Penelitian ini mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam pengembangan desa wisata Cikolelet beserta perannya. Namun, komunikasi antar-pemangku kepentingan, baik pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun jejaring lintas aktor, berjalan secara terpisah. Sinergi dalam pengembangan desa wisata belum terbentuk, sehingga kontribusi masing-masing pihak masih terbatas pada permintaan desa dan tupoksi instansi atau organisasi. Selain itu, pemahaman terhadap tradisi budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata masih minim, sehingga peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan atraksi wisata berbasis kearifan lokal belum optimal.
24	George Kofi Amoako, Theresa Obuobisa-Darko, Sylvia Ohene Marfo (2021) Judul: <i>Stakeholder role in tourism sustainability: the case of Kwame</i>	Empat pemangku kepentingan utama yang berperan menurut Goeldner dan Ritchie (2005) adalah: Wisatawan, Pelaku bisnis, Pemerintah, Komunitas tuan rumah, yaitu penduduk.	Metode penelitian ini, yaitu kualitatif.	Penelitian menunjukkan industri pariwisata Ghana menghadapi banyak tantangan; pemerintah perlu menyediakan infrastruktur dasar, sementara pemangku kepentingan harus mengembangkan keunggulan kompetitif untuk membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan.

No.	Nama Penulis, Judul Artikel (Penelitian), dan Tahun Terbit	Teori yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Nkrumah Mausoleum and centre for art and culture in Ghana.</i>			
25	Rizky Ilhami (2023) Judul: <i>Analysis of the Role of Stakeholders in Tourism Attraction Development Policy in Sumedang Regency.</i>	Peran <i>stakeholder</i> menurut (Nugroho, 2014), meliputi: Pembuat kebijakan, Koordinator, Fasilitator, Pelaksana, dan Akselerator.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Pengembangan pariwisata Sumedang membutuhkan perhatian serius; koordinasi antar-pemangku kepentingan belum optimal, sehingga Dinas Pariwisata perlu lebih proaktif, termasuk meningkatkan infrastruktur digital untuk mendukung promosi.

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai artikel jurnal (2025)

Pada Tabel 1.5, terlihat bahwa dalam berbagai penelitian terdahulu, analisis dan peran pemangku kepentingan telah diterapkan pada sejumlah pemerintah daerah di Indonesia maupun di negara lain. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam kegiatan dan program kepariwisataan merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan sektor ini.

Peran pemangku kepentingan memiliki dampak yang signifikan terhadap penerapan manajemen ekosistem berkelanjutan serta pengembangan pariwisata. Di dalam konteks pariwisata, pemangku kepentingan meliputi pemerintah, masyarakat lokal, pelaku industri pariwisata, dan organisasi non-pemerintah, yang masing-masing memiliki kepentingan dan peran berbeda. Jika peran ini dikelola dengan baik, mereka dapat menciptakan sinergi yang positif untuk pengembangan destinasi pariwisata. Sebagai contoh, dalam penelitian mengenai desa wisata (Kusuma dkk., 2022), pada konteks pengembangan Desa Wisata Cempaka, pemangku kepentingan utama meliputi Pokdarwis Cempaka, sektor swasta (termasuk BUMN dan perusahaan), serta akademisi dari institusi pendidikan tinggi. *Stakeholder* ini dianggap sebagai aktor yang memiliki pengaruh signifikan serta kepentingan yang krusial dalam upaya pengembangan desa wisata tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, setiap pemangku kepentingan telah melaksanakan perannya sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki. Namun, terdapat beberapa pihak yang belum mengoptimalkan peranannya secara maksimal. Salah satunya adalah Pemerintah Desa Cempaka, yang perlu meningkatkan perhatian terhadap keberlanjutan sektor pariwisata di wilayahnya. Upaya tersebut dapat diwujudkan

melalui pemberian stimulus, seperti alokasi dana desa yang dialokasikan sebagian untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Penelitian lain oleh Ginting (2021) yang mengkaji peran *stakeholders* dalam pengembangan Pariwisata Siosar, peran yang dijalankan oleh *stakeholder* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) masih belum maksimal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata di wilayah ini. Masih terdapat ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan perencanaan yang ideal, baik dari sisi pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan dan pengembangan wisata, sektor swasta belum menyediakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan harapan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan kawasan wisata Siosar masih belum optimal.

Akan tetapi, pengembangan wisata melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan ini sering kali mengalami beberapa masalah. Masalah pertama, yaitu belum terbangunnya kemitraan dan jaringan kerja sama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan terkait. Masing-masing pemangku kepentingan belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawabnya. Permasalahan kedua, biasanya terjadi karena kurang optimalnya komitmen dan keterlibatan aktif dari sebagian pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat umum. Permasalahan selanjutnya bisa terjadi karena masih belum terwujudnya koordinasi dan sinergi yang baik antara manajemen objek wisata dengan pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Keterbatasan dana dan sumber daya yang dapat dikerahkan pemangku

kepentingan untuk mendukung pengembangan wisata ekowisata secara berkelanjutan juga bisa menjadi permasalahan. Terakhir, yaitu belum tersedianya kebijakan dan peraturan yang mendukung peran serta pemangku kepentingan dalam pengembangan wisata berkelanjutan di daerah.

Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul "*Analisis Stakeholders dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang*" terletak pada aspek lokasi penelitian. Berdasarkan tabel yang memaparkan kajian-kajian sebelumnya mengenai peran pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis peran pemangku kepentingan dalam pengembangan destinasi pariwisata Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang.

1.6.2. Administrasi Publik

Pada kata administrasi publik memiliki kata baku, yaitu administrasi dan publik. Menurut McDury dalam Yuniningsih (2025), hasil studi literatur yang dilakukannya menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang dapat dianalisis melalui pendekatan politik. Pendekatan ini mengacu pada administrasi publik sebagai suatu metode yang mencakup pelaksanaan perintah dalam suatu wilayah yang secara spesifik dikategorikan sebagai negara. Selain itu, administrasi publik juga dapat diartikan sebagai suatu prinsip dasar yang digunakan dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintahan guna mencapai tujuan negara.

Berbeda dengan McDurry, Barton dan Chappel, sebagaimana dikutip oleh Stillman II dalam Yuniningsih (2025), mendefinisikan administrasi publik sebagai

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan menekankan pada aspek terlibatnya personil atau orang dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Federick A. Cleveland dalam Yuniningsih (2025), yang menyatakan bahwa administrasi publik memiliki peran strategis dalam pemberdayaan sosial serta penciptaan lingkungan demokratis. Administrasi publik dirancang untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung apabila pemerintah menerapkan profesionalisme, serta mengacu pada prinsip efektivitas dan efisiensi dalam setiap kebijakan dan tindakannya. Lebih lanjut, optimalisasi administrasi publik dapat tercapai apabila pemerintah turut berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan sebagian tanggung jawab administrasi publik serta berkontribusi dalam membangun sistem demokrasi yang terorganisir (*organized democracy*).

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2019), administrasi publik dapat dipahami sebagai rangkaian proses yang mencakup pengoordinasian serta pengelolaan berbagai sumber daya dan aparatur pemerintah dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengendalikan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Lebih lanjut, administrasi publik dipandang sebagai suatu bidang ilmu sekaligus praktik yang berfokus pada pengelolaan urusan-urusan publik serta pelaksanaan fungsi pemerintahan yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin akademik, administrasi publik bertujuan untuk merespons permasalahan publik melalui upaya peningkatan dan reformasi, terutama dalam aspek organisasi, manajemen sumber daya manusia, serta pengelolaan keuangan negara. Pendapat lain juga dikemukakan

dalam studi yang dilakukan oleh Panjaitan & Pardede (2021), mengungkapkan bahwa Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang memfokuskan kajiannya pada pengelolaan organisasi publik. Pelayanan terhadap masyarakat menjadi fokus utama dalam bidang ini. Menurut konteks tersebut, pemerintah berperan sebagai regulator yang proaktif dan memiliki inisiatif dalam merumuskan kebijakan yang mengatur kepentingan publik. Mengingat bahwa kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama dalam kegiatan pemerintahan, maka penting bagi pemerintah untuk bersikap lebih responsif dan sensitif terhadap perubahan serta kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan berbagai pandangan ahli dalam bidang administrasi publik, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan perpaduan antara kerangka teoritis dan praktik pemerintahan, termasuk pengelolaan sumber daya dan keterlibatan masyarakat yang terstruktur. Tujuan administrasi publik adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan secara efisien, fleksibel, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat umum. Penerapan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan industri pariwisata dibahas dalam makalah ini menggunakan kerangka teoritis administrasi publik. Penelitian berjudul “Analisis *Stakeholders* dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang” menjadi relevan dalam kajian administrasi publik karena menempatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rembang sebagai aktor birokratis yang berperan langsung dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pengembangan pariwisata di wilayah tersebut.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Perubahan dan perkembangan dalam suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri melalui kajian terhadap pergeseran paradigma yang mendasarinya. Menurut Kuhn dalam Yuniningsih (2025), paradigma didefinisikan sebagai cara pandang terhadap suatu fenomena yang mencakup nilai-nilai, metode, prinsip dasar, serta pendekatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Paradigma ini diterapkan oleh suatu kelompok atau komunitas ilmiah dalam rentang waktu tertentu. Pergeseran paradigma dapat terjadi apabila kepercayaan yang dianut oleh kelompok tersebut mengalami krisis atau anomali, sehingga mendorong pencarian perspektif baru yang lebih relevan, atau dengan kata lain, munculnya paradigma baru.

Administrasi publik sebagai suatu bidang ilmu tidak terlepas dari pengaruh perkembangan lingkungan, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi. Oleh karena itu, administrasi publik dituntut untuk beradaptasi dengan paradigma yang berlaku agar mampu melakukan reformasi sesuai dengan prinsip *good governance*, yang menjadi tuntutan utama masyarakat saat ini. Di dalam konteks perubahan paradigma administrasi publik, Nicholas Henry merupakan salah satu tokoh yang berkontribusi besar dalam mengembangkan konsep ini. Awalnya, pada tahun 1970-an, Henry mengidentifikasi lima paradigma dalam administrasi publik. Namun, pada tahun 2018, ia merevisi karyanya dengan memperkenalkan paradigma baru sehingga jumlah paradigma administrasi publik saat ini bertambah menjadi enam (Yuniningsih, 2025), yaitu sebagai berikut:

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Pada paradigma awal administrasi publik, kebijakan diposisikan sebagai perwujudan kehendak masyarakat dan menjadi inti dari proses politik. Dalam paradigma ini, terdapat pemisahan tegas antara ranah politik dan ranah administrasi, yang tercermin melalui diferensiasi fungsi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Lembaga legislatif berperan sebagai kanal representasi aspirasi publik dalam proses perumusan kebijakan, sedangkan lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan mengoperasionalkan kebijakan tersebut sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan. Pemisahan fungsi ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas administrasi serta memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan secara efektif, efisien, dan bebas dari intervensi politik praktis.

2. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Pada masa ini, administrasi publik berfokus pada penerapan prinsip-prinsip dasar administrasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Unsur utama yang ditekankan dalam kerangka kerja tersebut meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran.

3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pada fase ini, administrasi publik dipandang sebagai bagian dari disiplin ilmu politik. Seiring perkembangan zaman, muncul pemikiran bahwa konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu politik merupakan bagian penting dari administrasi publik. Meski demikian, pendekatan ini dinilai

kurang memberikan identitas mandiri bagi administrasi publik karena terlalu menonjolkan keterkaitannya dengan ilmu politik.

4. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Pada periode ini, prinsip-prinsip manajemen yang sebelumnya digunakan mulai dikembangkan menjadi lebih sistematis melalui metode ilmiah. Dalam perkembangannya, terdapat dua arus besar pemikiran. Pertama, kajian administrasi dilakukan dari berbagai perspektif, termasuk psikologi sosial. Kedua, fokus administrasi negara diarahkan pada analisis kebijakan publik serta implementasinya dalam aktivitas operasional pemerintahan.

5. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-an)

Pada tahap ini, kerangka administrasi negara mengalami perluasan dengan batasan dan cakupan yang lebih tegas dibandingkan sebelumnya. Fokus utama berada pada teori administrasi publik, yang mencakup teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik. Penekanan utama administrasi publik dalam kerangka kerja ini adalah untuk menangani berbagai masalah yang terkait dengan kepentingan publik secara terorganisir dan sistematis.

6. Paradigma Administrasi Publik sebagai *Governance* (1990-sekarang)

Model ini menempatkan administrasi publik sebagai alat utama untuk membangun tata kelola yang efektif dan akuntabel. Dalam kerangka ini, tata kelola demokratis harus didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan kejujuran. Selain itu, model ini menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya dipegang oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan

masyarakat sebagai peserta penting. Pelaksanaan tata kelola yang baik memerlukan keseimbangan antara tiga pilar utama: masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Ketiga entitas ini harus berfungsi bersama secara harmonis, kohesif, dan seimbang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Utomo dalam Hidayati (2022), dalam sistem pemerintahan yang menerapkan prinsip *governance*, diperlukan adanya sinergi antara tiga aktor utama, yaitu pemerintah (*public*), masyarakat (*community* atau *civil society*), serta sektor swasta (*private*). Lebih lanjut, Utomo dalam Hidayati (2022), menekankan bahwa ketiga aktor tersebut harus mampu menempatkan peran dan fungsinya secara proporsional sesuai dengan kapasitas serta lingkup kewenangannya masing-masing. Melalui kerja sama yang harmonis, mereka diharapkan dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan tujuan pembangunan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan teori di atas, dapat ditunjukkan bahwa penelitian mengenai peran *stakeholders* ini termasuk ke dalam paradigma ke lima, yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara. Pemetaan peran *stakeholders* dalam pengembangan destinasi wisata pantai dapat dikategorikan dalam paradigma kelima karena paradigma ini menegaskan batasan yang jelas dalam teori administrasi negara dengan menekankan tiga aspek utama, yaitu teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik.

Berdasarkan penjelasan teori di atas menunjukkan bahwa penelitian ini termasuk ke dalam paradigma keenam, yaitu *governance*. Paradigma ini

menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan serta pengembangan destinasi wisata. Pemerintah berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mengelola tata pemerintahan termasuk dalam hal penyelenggaraan layanan publik dan hubungan antar *stakeholder* untuk memenuhi kebutuhan publik. Penelitian ini berfokus pada peran para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang mencerminkan prinsip kolaborasi antara berbagai aktor dalam menciptakan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, paradigma *governance* menjadi kerangka yang paling relevan dalam menganalisis dinamika dan peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata.

1.6.4. Manajemen Publik

Terdapat konsep fundamental yang mendasari di dalam manajemen publik, yaitu dasar dari manajemen itu sendiri yang termuat di dalamnya. Menurut Shafritz dan Russel dalam Yuniningsih (2025), manajemen berkaitan dengan individu yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola suatu organisasi serta proses pelaksanaannya. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sementara itu, Donovan dan Jackson dalam Yuniningsih (2025), mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam suatu struktur hierarkis di dalam organisasi, yang mencakup berbagai tugas dan keterampilan tertentu. Salah satu bentuk spesifik dari manajemen adalah *manajemen publik*, yang

berfokus pada pengelolaan sektor publik dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Paradigma dalam Manajemen Publik terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan ini bermula dari konsep *Old Public Administration* (OPA) yang kemudian berkembang menjadi *New Public Management* (NPM), selanjutnya beralih ke konsep *government*, hingga akhirnya mengarah pada *governance*. Pergeseran paradigma ini turut melahirkan konsep baru, yakni kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pada model kolaboratif ini, selain peran pemerintah, keterlibatan kelompok kepentingan masyarakat maupun organisasi non-pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO) menjadi semakin signifikan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan publik (Tilano & Suwitri, 2019).

Menurut Overman dalam Satibi (2012:14), manajemen publik dipandang sebagai bidang kajian interdisipliner yang menelaah berbagai dimensi organisasi secara menyeluruh. Pendekatan ini mengintegrasikan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian dengan beragam jenis sumber daya, termasuk sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, serta dinamika politik. Selaras dengan itu, Pasolong dalam Satibi (2012:14) menjelaskan manajemen publik sebagai proses pengelolaan yang berlangsung dalam institusi pemerintahan. Meskipun definisi tersebut bersifat luas, inti pemahamannya menekankan pada pengelolaan organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, manajemen publik dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas pengelolaan sektor

publik yang dijalankan oleh lembaga pemerintah, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, perumusan strategi, serta evaluasi terhadap berbagai sumber daya baik manusia, anggaran, fasilitas, teknologi, maupun sumber daya pendukung lainnya yang keseluruhannya diarahkan untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Satibi, 2012).

Perkembangan manajemen publik memperoleh momentum signifikan pada dekade 1990-an melalui kemunculan konsep *New Public Management* (NPM). Pendekatan ini menandai pergeseran penting dalam praktik pengelolaan sektor publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Pasolong dalam Satibi (2012:16), NPM menekankan sejumlah prinsip utama, antara lain: pertama, peralihan dari pola administrasi publik konvensional menuju orientasi yang lebih menitikberatkan pada kinerja dan capaian hasil. Kedua, pelepasan dari karakter birokrasi tradisional dengan mendorong fleksibilitas yang lebih besar dalam struktur organisasi maupun pola kerja aparatur. Ketiga, penetapan tujuan serta target yang lebih terukur, sehingga memungkinkan dilakukannya penilaian kinerja secara objektif melalui indikator yang jelas dan evaluasi program yang sistematis berdasarkan dimensi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Keempat, peningkatan keterlibatan dan komitmen politik pejabat senior dalam mendukung agenda pemerintah dalam praktik operasional sehari-hari. Kelima, perluasan fungsi pemerintah dengan mengakomodasi mekanisme pasar serta kerja sama kontraktual dengan pihak eksternal, sehingga pelayanan publik tidak hanya bergantung pada birokrasi internal. Keenam, pengurangan peran langsung pemerintah melalui praktik privatisasi yang semakin berkembang.

Paradigma dalam Manajemen Publik terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan ini bermula dari konsep *Old Public Administration* (OPA) yang kemudian berkembang menjadi *New Public Management* (NPM), selanjutnya beralih ke konsep *government*, hingga akhirnya mengarah pada *governance*. Pergeseran paradigma ini turut melahirkan konsep baru, yakni kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pada model kolaboratif ini, selain peran pemerintah, keterlibatan kelompok kepentingan masyarakat maupun organisasi non-pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO) menjadi semakin signifikan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan publik (Tilano & Suwitri, 2019).

Berkaitan dengan *governance* sebagai *networks* dalam hubungannya dengan kemitraan, Loffler dan Bovaird dalam Hidayati (2022), mengemukakan bahwa konsep *governance* memiliki beberapa makna dalam kaitannya dengan kemitraan. Pertama, *governance* menggambarkan bagaimana para pemangku kepentingan saling berinteraksi untuk memengaruhi hasil kebijakan. Kedua, *governance* dapat dipahami sebagai pola atau struktur yang terbentuk dalam sistem sosial-politik sebagai konsekuensi dari interaksi dan intervensi yang dilakukan oleh berbagai aktor. Ketiga, *governance* menunjukkan adanya mekanisme koordinasi secara formal maupun antara sektor pemerintah dan nonpemerintah. Keempat, *governance* dipahami sebagai suatu pendekatan atau kerangka teori yang menjelaskan koordinasi dalam sistem sosial, termasuk peran negara di dalamnya. Selain itu, Loffler dan Bovaird dalam Hidayati (2022), juga menegaskan bahwa *governance* mencakup unsur-unsur mendasar yang berkaitan dengan bagaimana

berbagai aktor bekerja dalam suatu skenario kolaboratif dalam menghadapi permasalahan kolektif yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh otoritas publik. Pada situasi ini, diperlukan sinergi dengan pihak lain, seperti masyarakat, sektor bisnis, dan organisasi non-pemerintah (LSM), melalui mekanisme mediasi, arbitrase, dan regulasi mandiri (*self-regulation*), yang sering kali lebih efektif dibandingkan dengan intervensi langsung dari pemerintah.

Berdasarkan berbagai pandangan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat serta mewujudkan kepentingan yang lebih luas guna meningkatkan kesejahteraan publik secara keseluruhan. Hubungannya teori manajemen publik ini dengan pengembangan potensi pariwisata di Pantai Pasir Putih Wates Kabupaten Rembang, terletak pada manajemen publik yang menekankan bahwa pengelolaan sektor publik, termasuk pariwisata, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai aktor seperti masyarakat, dunia usaha, dan organisasi non-pemerintah (NGO).

1.6.5. Peran

Istilah “peran” memiliki akar dari dunia teater, yang mengungkapkan bahwa konsep ini berkaitan erat dengan status dan sulit dipisahkan satu sama lain (Usman dkk., 2023). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukan atau status tertentu yang dimilikinya. Status atau kedudukan ini menunjukkan posisi individu di dalam suatu kelompok. Peran yang dimiliki oleh

individu tersebut juga merupakan tanggung jawab utama yang harus dijalankan sesuai dengan kedudukan atau posisi mereka.

Uraian tersebut selaras dengan pandangan yang dikemukakan oleh Kahn dkk. dalam Rahman (2020), yang menyatakan bahwa peran merupakan karakteristik individu sebagai aktor sosial yang mempelajari dan menjalankan perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya, baik di lingkungan kerja maupun dalam masyarakat. Pada penjelasan ini, Kahn dkk. menegaskan bahwa seseorang berupaya menampilkan perilaku yang mencerminkan peran yang menjadi tanggung jawabnya di dalam organisasi.

Menurut Siagian dalam Usman dkk. (2023), peran dapat diartikan sebagai posisi atau fungsi yang dijalankan oleh seseorang dalam suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Riyadi dalam Usman dkk. (2023), menjelaskan bahwa peran merujuk pada arah dan konsep yang melekat pada suatu fungsi yang dijalankan oleh individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial, yang secara inheren berinteraksi dengan peran lainnya dalam struktur sosial tersebut.

Soerjono Soekanto dalam Yare (2021), menjelaskan bahwa peran merupakan dimensi dinamis dari suatu kedudukan (status), di mana individu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimilikinya dalam suatu struktur sosial. Dengan kata lain, peran mencerminkan pelaksanaan fungsi sosial seseorang dalam suatu sistem, yang terwujud melalui tindakan dan tanggung jawab yang sesuai dengan status yang diembannya.

Peran diwujudkan melalui perilaku yang dilakukan oleh individu sebagai aktor dalam suatu sistem sosial. Manifestasi perilaku dalam menjalankan peran

bersifat nyata dan beragam, di mana setiap individu dapat menunjukkan perbedaan dalam pelaksanaannya. Di dalam perspektif teori peran, variasi tersebut dianggap sebagai fenomena yang wajar dan tidak memiliki batasan yang kaku. Teori ini tidak mengklasifikasikan peran berdasarkan tindakan spesifik, tetapi lebih menitikberatkan pada karakteristik dasar perilaku serta tujuan atau motivasi di baliknya. Oleh karena itu, bentuk perilaku dalam peran dapat dikategorikan ke dalam berbagai aspek, seperti pencapaian dalam dunia kerja, keterlibatan dalam pembangunan, pemenuhan kebutuhan ekonomi, serta upaya dalam menjaga ketertiban sosial (Yare, 2021).

1.6.6. Identifikasi *Stakeholder*

Stakeholder dipahami sebagai individu maupun kelompok yang memiliki keterkaitan kepentingan dengan suatu organisasi dan dapat dipengaruhi atau memberi pengaruh terhadap aktivitas organisasi tersebut (Philip dkk. dalam Fuadah & Hakimi, 2020). Reed dalam Saputro (2011) menegaskan bahwa *stakeholder* mencakup pihak-pihak, baik perseorangan, kelompok sosial, maupun institusi, yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu proses, termasuk dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata. Dalam konteks kajian kebijakan dan pengelolaan program, analisis *stakeholder* berfungsi sebagai metode untuk mengidentifikasi, memetakan, serta menilai kepentingan, pengaruh, dan kontribusi para pemangku kepentingan terhadap implementasi suatu program (Salsabila & Santoso, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika hubungan antar-aktor serta menentukan strategi kolaboratif yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan.

Hertifah dalam Tilano & Suwitri (2019) menjelaskan bahwa *stakeholder* merupakan individu maupun kelompok organisasi, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kepentingan serta kemampuan memengaruhi jalannya suatu program pembangunan. Pandangan ini selaras dengan Schemer dalam Hidayati (2022), yang menegaskan bahwa *stakeholder* dalam suatu proses merupakan aktor, baik perseorangan, kelompok, maupun institusi, yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan yang sedang dirumuskan dan berpotensi memberikan pengaruh pada arah maupun hasil kebijakan tersebut.

Pengelolaan berbagai kepentingan dan kebutuhan para pemangku kepentingan secara efektif menjadi syarat penting dalam mencapai sasaran pembangunan yang dirumuskan. *Stakeholder* mencakup seluruh unsur masyarakat yang memiliki kepentingan serta mengambil peran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan suatu program atau aktivitas pembangunan. Freeman dalam Berliandaldo dkk. (2021) mengelompokkan para pemangku kepentingan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

1. *Stakeholder* Primer, yaitu aktor yang terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan.
2. *Stakeholder* sekunder, yaitu pihak-pihak yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam proses operasional organisasi, tetapi tetap memberikan pengaruh keberlangsungan kegiatan tersebut.

Pembagian *stakeholder* tersebut hampir sama dengan yang dilakukan oleh Crosby (1991). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Crosby (1991), *stakeholder* dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. *Stakeholder* Utama (Primer)

Stakeholder utama merupakan individu atau kelompok yang terdampak secara langsung, baik dalam bentuk keuntungan maupun kerugian oleh sebuah program atau kegiatan, sehingga memiliki kepentingan yang bersifat langsung dan harus dilibatkan secara intensif sepanjang proses perencanaan hingga pelaksanaan. Posisi *stakeholder* primer sangat strategis dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan, termasuk dalam sektor pariwisata. Dalam konteks pengembangan destinasi wisata, masyarakat lokal yang bermukim di sekitar kawasan wisata merupakan aktor primer yang memegang peranan sentral. Mereka berfungsi tidak hanya sebagai sumber daya manusia yang mengelola, tetapi juga sebagai penggerak utama yang mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan destinasi. Secara konseptual, masyarakat sebagai *stakeholder* primer dapat diklasifikasikan ke dalam tiga peran, yaitu: (1) masyarakat yang berkontribusi dalam pembangunan fasilitas destinasi wisata, (2) masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan operasional destinasi, dan (3) masyarakat yang berperan sebagai pengguna sekaligus penerima manfaat dari kegiatan pariwisata.

2. *Stakeholder* Kunci

Stakeholder kunci merupakan aktor yang memiliki pengaruh strategis terhadap identifikasi kebutuhan, penyelesaian permasalahan, serta keberlangsungan suatu kegiatan. Kelompok ini biasanya memiliki otoritas formal dalam proses pengambilan keputusan, seperti pemerintah daerah

yang memegang kewenangan legislatif maupun eksekutif dalam merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata. Peran utama *stakeholder* kunci mencakup penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyediaan edukasi atau penyuluhan, serta pemberian dukungan teknis yang diperlukan untuk mendorong perkembangan sektor pariwisata.

3. *Stakeholder* Pendukung (Sekunder)

Stakeholder pendukung atau yang sering disebut sebagai *stakeholder* sekunder, merupakan aktor yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap proses pengembangan, namun tetap memiliki kontribusi penting dalam menunjang keberlangsungan kegiatan serta memengaruhi proses pengambilan keputusan. Kelompok ini mencakup pihak-pihak seperti investor atau sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan akademisi atau peneliti, serta institusi media. Peran mereka antara lain memberikan rekomendasi, masukan analitis, dan pertimbangan strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau program. Lebih jauh, keberadaan *stakeholder* sekunder juga berpengaruh terhadap pembentukan opini publik dan sikap masyarakat dalam mendukung arah pengembangan destinasi wisata. Akademisi, misalnya, berkontribusi melalui kajian ilmiah dan penyusunan konsep yang dapat menjadi dasar inovasi pengembangan pariwisata, sementara sektor swasta berperan dalam penyediaan fasilitas maupun investasi yang meningkatkan kualitas layanan wisata.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa klasifikasi *stakeholder* di atas, peneliti akan menggunakan konsep dari Crosby (1991), untuk melakukan identifikasi aktor yang terlibat dalam pengembangan destinasi pariwisata Pantai Pasir Putih Wates Kabupaten Rembang, yaitu *stakeholder* primer, *stakeholders* kunci, dan *stakeholders* sekunder (pendukung).

1.6.7. Peran *Stakeholder*

Menurut Soekamto dalam Handayani & Warsono (2017), suatu individu dikatakan menjalankan peran ketika ia melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat pada posisi serta otoritas yang dimilikinya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana peran para pemangku kepentingan dijalankan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ginting dkk. (2022) yang menegaskan bahwa setiap *stakeholder* membawa sumber daya, kepentingan, dan perspektif tertentu yang harus terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan agar pembangunan dapat berlangsung secara optimal. Peran *stakeholder* menjadi elemen krusial dalam setiap agenda pembangunan, termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata. Nugroho dkk. (2014) menyebutkan bahwa pemangku kepentingan memiliki fungsi strategis sebagai perumus kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan akselerator. Kelima peran tersebut dapat ditemukan pada seluruh kategori *stakeholder*, baik yang berstatus utama, kunci, maupun pendukung.

1. *Policy Creator*

Pemangku kepentingan dalam kategori ini merupakan pihak yang memiliki otoritas untuk merumuskan kebijakan serta menentukan arah pengambilan keputusan strategis dalam suatu program.

2. Koordinator

Koordinator adalah aktor yang bertugas menyelaraskan dan menghubungkan berbagai pihak yang terlibat, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan secara terorganisasi dan terpadu.

3. Fasilitator

Fasilitator berperan menyediakan dukungan, layanan, atau sumber daya yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran, sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung secara efektif.

4. *Implementor*

Stakeholder yang berada pada posisi ini bertanggung jawab mengoperasionalkan dan mengeksekusi kebijakan di lapangan, termasuk melaksanakan aktivitas yang ditujukan kepada kelompok sasaran.

5. Akselerator

Akselerator merupakan pihak yang berfungsi mempercepat pencapaian tujuan program dengan memberikan dukungan tambahan, mendorong efektivitas, dan mempercepat proses implementasi agar hasil yang direncanakan dapat dicapai lebih cepat.

1.6.8. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Destinasi Wisata

Faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata didasarkan pada indikator nilai, komunikasi, kepercayaan, serta kebijakan (Destiana dkk., 2020), yaitu:

1. Nilai

Nilai berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam menjalani kehidupan yang terarah, karena nilai memberikan makna melalui keyakinan dan tujuan hidup. Di dalam konteks pengembangan pariwisata, nilai memiliki peran yang sangat penting karena dapat memengaruhi perilaku manusia. Selain itu, nilai yang dimiliki dan dianut oleh setiap pemangku kepentingan juga berkontribusi dalam membentuk dinamika serta arah perkembangan sektor pariwisata.

2. Komunikasi

Komunikasi yang efektif merupakan faktor pendukung utama dalam menjalin kerja sama antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan destinasi pariwisata. Pada sektor pariwisata, komunikasi memegang peranan penting karena dapat membangun pemahaman, menumbuhkan minat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengunjungi suatu objek wisata. Selain itu, komunikasi yang efektif juga berkontribusi dalam mempererat hubungan antar *stakeholders*, menyelesaikan perbedaan pandangan, serta meredam potensi konflik yang dapat timbul dalam proses pengelolaan pariwisata.

3. Kepercayaan

Kepercayaan antar pemangku kepentingan menjadi elemen krusial dalam memperlancar hubungan kerja sama serta menciptakan rasa aman di antara pihak-pihak yang terlibat. Kepercayaan ini dapat diukur berdasarkan aspek keandalan, kejujuran, kepedulian, dan kredibilitas yang dimiliki oleh setiap aktor. Selain itu, kepercayaan juga mencerminkan keyakinan masing-masing

pihak dalam menjalin kemitraan dengan pihak lain guna mencapai tujuan bersama secara efektif.

4. Kebijakan

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan yang menetapkan peran spesifik bagi setiap aktor yang terlibat dalam jaringan pengembangan pariwisata. Menurut Judisseno dalam Destiana dkk. (2020), kebijakan pemerintah menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan sektor pariwisata. Kebijakan tersebut berperan sebagai pedoman serta instrumen pengawasan dalam implementasi program pengembangan pariwisata.

1.6.9. Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata dipahami sebagai rangkaian aktivitas perjalanan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, maupun pemerintah daerah. Sementara itu, Macintosh dalam Yoeti (2016) menjelaskan bahwa pariwisata merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas wisatawan, yang pada gilirannya membentuk hubungan timbal balik antara wisatawan dan penyedia jasa wisata, interaksi antara wisatawan dan pemerintah, serta keterlibatan wisatawan dengan masyarakat lokal sebagai pemilik dan pengelola destinasi wisata. Leiper dalam Yoeti (2016), menyatakan bahwa pariwisata terdiri dari beberapa elemen, yakni wisatawan, negara asal wisatawan, negara transit, dan negara tujuan wisatawan, yang terhubung

dalam sebuah sistem terbuka yang saling berinteraksi dalam konteks lingkungan wisata.

Menurut Krapf dalam Nabila (2022), pariwisata dipahami sebagai serangkaian sistem dan fenomena yang muncul akibat keberadaan orang asing di suatu daerah, dengan batasan bahwa kehadiran mereka tidak bertujuan melakukan aktivitas produktif atau kegiatan yang menghasilkan keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Pandangan ini sejalan dengan Suwanto dalam Yuniningsih (2025) yang menjelaskan bahwa pariwisata merupakan aktivitas perjalanan sementara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok ke lokasi di luar tempat tinggalnya, dengan motivasi tertentu yang tidak berkaitan dengan upaya memperoleh pendapatan.

Suena dan Widyatmaja dalam Yuniningsih (2025), menyebutkan bahwa terdapat berbagai macam jenis pariwisata, di antaranya:

a. Klasifikasi Pariwisata Berdasarkan Letak Geografis

1. Pariwisata Lokal (*Local Tourism*)

Pariwisata lokal dapat dipahami sebagai bentuk aktivitas wisata yang berlangsung dalam lingkup geografis yang relatif sempit atau terbatas pada wilayah administrasi tertentu. Contohnya, praktik pariwisata yang berfokus pada kawasan-kawasan di dalam Kota Denpasar atau Kota Bandung, di mana mobilitas wisatawan, pemanfaatan daya tarik wisata, serta pengelolaan destinasi terpusat pada ruang lokal tersebut.

2. Pariwisata Regional (*Regional Tourism*)

Pariwisata regional dipahami sebagai aktivitas kepariwisataan yang berlangsung dalam suatu kawasan tertentu, baik pada skala nasional maupun lintas negara. Bentuk pariwisata ini umumnya berkembang pada daerah yang telah memiliki daya tarik dan infrastruktur pendukung yang kuat, seperti Bali dan Yogyakarta, sehingga mampu menarik wisatawan dari berbagai wilayah dalam cakupan regional.

3. Pariwisata Nasional (*National Tourism*)

Pariwisata nasional merujuk pada keseluruhan aktivitas kepariwisataan yang berlangsung dalam batas teritorial suatu negara. Kegiatan wisata tersebut melibatkan wisatawan domestik maupun warga negara asing yang berdomisili tetap di negara tersebut. Dengan demikian, pariwisata nasional mencerminkan dinamika industri wisata secara menyeluruh di tingkat negara, sebagaimana terlihat pada perkembangan sektor pariwisata di berbagai daerah di Indonesia.

4. Pariwisata Regional-Internasional

Pariwisata internasional kawasan merupakan bentuk aktivitas wisata yang berkembang dalam ruang lingkup lintas negara yang masih berada dalam satu kawasan geografis atau regional. Jenis pariwisata ini mencakup mobilitas wisatawan antar dua atau lebih negara yang memiliki kedekatan wilayah, kerja sama regional, atau kesamaan karakter destinasi. Salah satu contohnya adalah perkembangan pariwisata di kawasan ASEAN, di mana

negara-negara anggota saling terhubung melalui integrasi destinasi dan promosi bersama dalam satu kawasan regional.

5. Pariwisata Internasional (*International Tourism*)

Pariwisata internasional mencakup kegiatan wisata yang berkembang di berbagai negara di dunia, dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan jenis pariwisata lainnya.

b. Klasifikasi Pariwisata Berdasarkan Pengaruh terhadap Neraca Pembayaran

1. Pariwisata Aktif (*Inbound Tourism*). Pariwisata aktif ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke suatu negara. Hal ini berkontribusi pada pemasukan devisa negara dan memperkuat neraca pembayaran negara tujuan wisata.
2. Pariwisata Pasif (*Outgoing Tourism*). Pariwisata pasif terjadi ketika warga suatu negara melakukan perjalanan ke luar negeri sebagai wisatawan. Dari perspektif ekonomi, kegiatan ini berdampak negatif terhadap devisa negara asal wisatawan karena pengeluaran mereka terjadi di luar negeri.

c. Klasifikasi Pariwisata Berdasarkan Objek Wisata

1. Pariwisata Budaya. Pariwisata budaya adalah jenis perjalanan yang didorong oleh keinginan untuk menjelajahi seni dan warisan budaya suatu wilayah atau negara tertentu.
2. Pariwisata Pemulihan. Bentuk pariwisata ini dilakukan untuk memperoleh manfaat kesehatan, misalnya dengan mengunjungi sumber air panas atau mengikuti terapi lumpur.

3. Pariwisata Bisnis. Bentuk pariwisata ini berfokus pada kegiatan bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional.
4. Pariwisata Olahraga. Pariwisata olahraga berfokus pada menonton atau berpartisipasi dalam acara olahraga yang berlangsung di wilayah atau negara tertentu.
5. Pariwisata Politik. Bentuk pariwisata ini dilakukan dengan tujuan untuk berpartisipasi atau mengamati acara atau perayaan yang terkait dengan unsur-unsur politik suatu negara, seperti perayaan hari kemerdekaan.
6. Pariwisata Berorientasi Komunitas. Pariwisata sosial merujuk pada bentuk pariwisata yang tidak berfokus pada tujuan komersial, termasuk kegiatan seperti perjalanan edukatif atau aktivitas rekreasi berkelompok.
7. Pariwisata Berbasis Keagamaan. Jenis pariwisata ini menekankan perjalanan ke tempat-tempat suci atau partisipasi dalam acara keagamaan, termasuk ibadah haji dan umrah bagi umat Muslim serta upacara Bali Krama di Pura Besakih.
8. Pariwisata Bahari. Pariwisata laut mencakup berbagai aktivitas yang berlangsung di lingkungan laut, didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk kegiatan seperti berenang, menyelam, memancing, dan berbagai olahraga air. Fasilitas pendukung tambahan meliputi akomodasi, tempat makan, dan opsi transportasi.

Berdasarkan jenis pariwisata tersebut, Pantai Pasir Putih Wates dalam letak geografisnya dapat dikategorikan sebagai, pariwisata lokal (*local tourism*) karena cakupan wilayah yang terbatas pada area tertentu dan terbatas. Kedua, menurut

neraca pembayaran dikategorikan pariwisata aktif (*in bound tourism*) karena menambah kontribusi devisa negara. Ketiga, dilihat dari objeknya masuk ke dalam kategori pariwisata bahari (*marine tourism*) karena berhubungan dengan aktivitas alam laut dan pantai, kemudian didukung dengan restoran serta akomodasi.

1.6.10. Pengembangan Pariwisata

Munasef dalam Chaerunissa dan Yuniningsih (2020) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata merupakan serangkaian aktivitas dan upaya yang dirancang secara terpadu untuk menarik wisatawan, sekaligus menyediakan sarana, prasarana, layanan, serta fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sejalan dengan itu, Pearce dalam sumber yang sama mendefinisikan pengembangan pariwisata sebagai proses peningkatan dan penyediaan fasilitas serta layanan yang dibutuhkan masyarakat maupun wisatawan. Pebriyanti dalam Hidayati (2022) menegaskan bahwa pengembangan pariwisata merupakan langkah strategis yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan tertentu serta mendukung agenda pembangunan yang lebih luas.

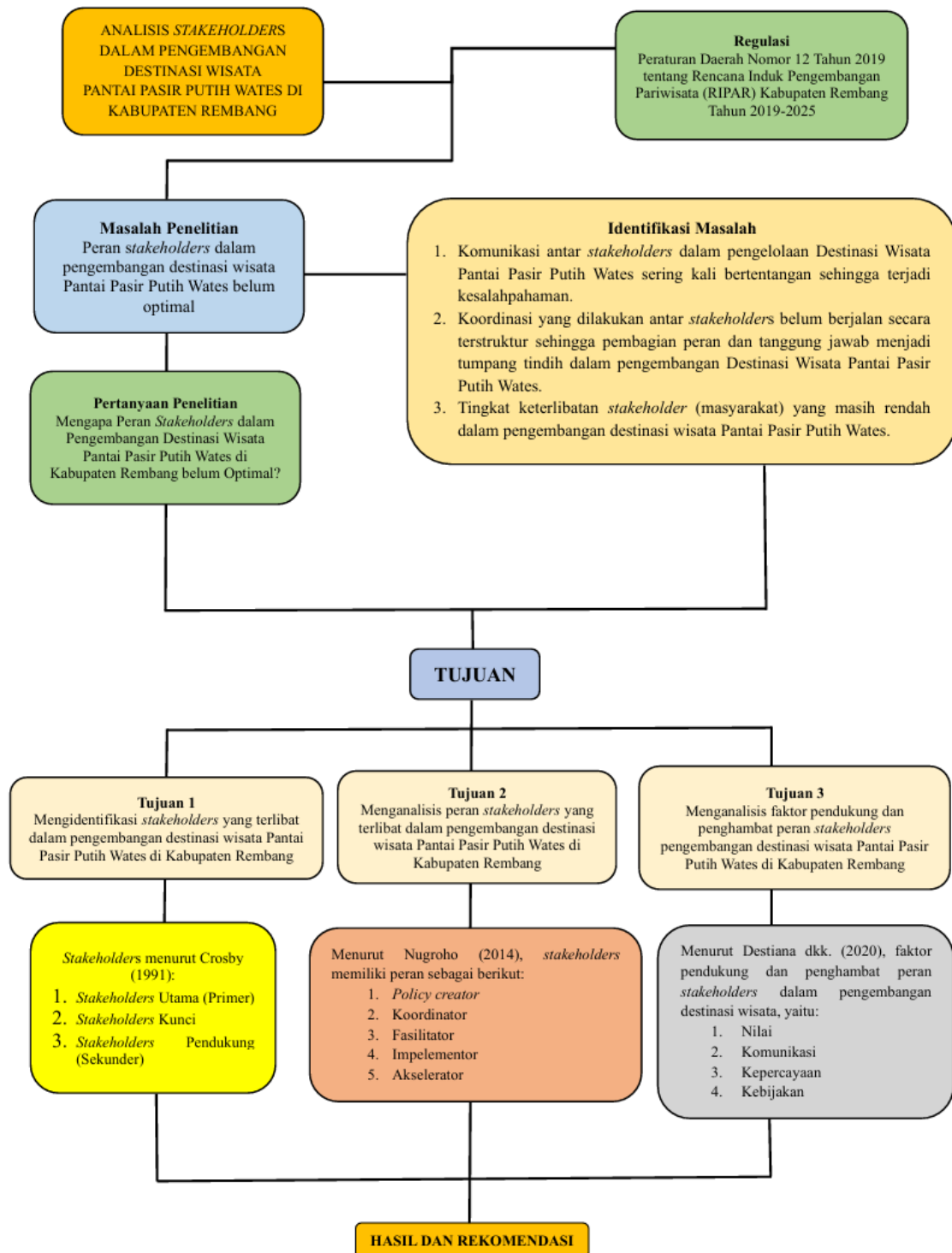
Lebih lanjut, Yoeti dalam Yuniningsih (2025) memandang pengembangan pariwisata sebagai upaya terencana dan sadar untuk meningkatkan mutu produk wisata yang telah tersedia sekaligus memperluas ragam penawaran wisata. Di sisi lain, Soetomo dalam Yuniningsih (2025) menekankan bahwa pengembangan pariwisata bersifat dinamis dan berorientasi pada masa depan, karena harus mampu menjawab berbagai tantangan yang terus berkembang dalam sektor pariwisata.

Cooper dkk. dalam Yuniningsih (2025), mengemukakan bahwa elemen pendukung dalam sektor pariwisata merupakan aspek fundamental yang harus

tersedia dalam suatu destinasi wisata. Komponen tersebut dikenal sebagai konsep 4A, yaitu:

1. Daya tarik wisata (*attraction*) merupakan unsur utama yang memotivasi wisatawan untuk memilih dan mengunjungi suatu destinasi. Komponen ini mencakup berbagai bentuk atraksi yang dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu atraksi yang bersumber dari potensi alam, atraksi yang berakar pada nilai dan praktik kebudayaan, serta atraksi yang diciptakan melalui rekayasa atau inovasi manusia.
2. *Amenities* (fasilitas penunjang) merujuk pada berbagai seluruh bentuk sarana dan prasarana yang tersedia di suatu destinasi untuk memenuhi kebutuhan pengunjung selama melakukan aktivitas wisata. Unsur-unsur pendukung ini mencakup berbagai layanan dan infrastruktur yang dirancang untuk memastikan wisatawan memperoleh kenyamanan, keamanan, serta kemudahan dalam menikmati pengalaman berwisata.
3. *Activities* (aktivitas) merupakan rangkaian kegiatan yang disusun dan diselenggarakan di lokasi destinasi untuk memberikan pengalaman bermakna bagi wisatawan. Aktivitas ini berperan menghidupkan dinamika kawasan wisata serta menawarkan bentuk rekreasi, hiburan, atau pembelajaran yang dapat meningkatkan kepuasan pengunjung.
4. *Accessibility* (aksesibilitas), yaitu fasilitas yang menyediakan kemudahan bagi wisatawan dalam mengakses destinasi wisata, termasuk sarana transportasi dan infrastruktur jalan yang menghubungkan lokasi tujuan wisata.

1.7. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.6. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

1.8. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan tahap dalam proses pengumpulan data yang bertujuan untuk mengubah gagasan yang bersifat abstrak menjadi lebih terukur sehingga mempermudah dalam pengukuran variabel. Proses ini juga dapat didefinisikan sebagai penetapan batasan-batasan pada konsep-konsep yang menjadi pedoman dalam penelitian. Di dalam mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang ada, dilakukan penjabaran mengenai hubungan antara konsep dan fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat serta peran mereka berdasarkan kapabilitas masing-masing dalam proses pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates, di mana berbagai pemangku kepentingan saling berinteraksi dan berkontribusi.

1. Identifikasi *Stakeholder*

Stakeholder adalah individu, organisasi, atau kelompok, laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kepentingan, berperan aktif, atau terdampak, baik secara positif maupun negatif oleh suatu program pembangunan. *Stakeholder* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Identifikasi *Stakeholder* dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Stakeholder* Utama (Primer) adalah *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan menerima dampak dari pengembangan pariwisata. Gejala yang akan diamati, yaitu:
 1. *Stakeholder* yang memiliki pengaruh langsung dalam pengembangan pariwisata.

2. *Stakeholder* yang terkena dampak langsung, baik itu positif maupun negatif.
3. *Stakeholder* yang berpartisipasi dalam seluruh tahapan proses pengembangan pariwisata.

b) *Stakeholder* Kunci adalah *stakeholder* yang mempunyai kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan dan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata. Gejala yang akan diamati, yaitu:

1. *Stakeholder* memiliki kepentingan dan kewenangan besar dalam pengelolaan pariwisata.
2. *Stakeholder* yang mempunyai kewenangan legal dalam pengambilan keputusan.
3. *Stakeholder* yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan program.

c) *Stakeholder* Pendukung (Sekunder) adalah *stakeholder* yang mempunyai perhatian pada proses pengembangan pariwisata, tetapi tidak memiliki kepentingan secara langsung. Gejala yang akan diamati, yaitu:

1. *Stakeholder* memiliki kepedulian besar dalam pengelolaan pariwisata.
2. *Stakeholder* tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap pengembangan pariwisata.

2. Peran *Stakeholder*

Peran *stakeholder* adalah serangkaian perilaku yang muncul sebagai akibat dari suatu jabatan atau posisi tertentu. Tugas, fungsi, posisi, dan kedudukan pemangku kepentingan ditentukan berdasarkan peran yang dimiliki oleh masing-masing

pemangku kepentingan tersebut. Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates Kabupaten Rembang dapat dilihat sebagai berikut:

a) *Policy Creator*, adalah *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan. Gejala yang akan diamati adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder* yang memiliki kewenangan dalam merancang program serta mengambil keputusan kebijakan.
2. *Stakeholder* yang berperan untuk mengidentifikasi fenomena dan pemilihan alternatif terbaik untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

b) Koordinator, adalah *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pengembangan.

Gejala yang akan diamati adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder* yang memiliki tugas untuk mengoordinasikan *stakeholder* lain (koordinator utama).
2. *Stakeholder* yang mengakomodasi kebutuhan dalam pengelolaan pariwisata.
3. *Stakeholder* yang berperan dalam memberikan arahan dan mengintegrasikan pengelolaan sumber daya yang tersedia.

c) Fasilitator, adalah *stakeholder* yang memiliki tugas untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelompok sasaran dalam pengembangan pariwisata.

Gejala yang akan diamati adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder* yang memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan dalam proses pengembangan pariwisata.
2. *Stakeholder* yang berperan memberikan informasi terkait pengelolaan pariwisata.

d) *Implementor*, adalah *stakeholder* yang berperan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Gejala yang akan diamati adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder* yang terlibat sebagai pelaksana pengembangan pariwisata.

e) Akselerator, adalah *Stakeholder* yang berfungsi untuk mempercepat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Gejala yang akan diamati adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder* yang memiliki peran dalam mempercepat pencapaian tujuan pengembangan pariwisata.
2. *Stakeholder* berkontribusi dalam mempercepat waktu pelaksanaan pengelolaan pariwisata.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Peran *Stakeholders*

Faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini dapat dilihat dari gejala sebagai berikut:

1. *Nilai* adalah pedoman bagi individu untuk menjalani kehidupan yang terarah dan dapat memengaruhi perilaku individu tersebut, dapat dilihat dari:

- a) Nilai individu, yaitu prinsip yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tindakan dan mengambil keputusan.
- b) Nilai profesionalitas adalah kemampuan dan komitmen individu dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya.
- c) Nilai organisasi adalah prinsip yang mengatur perilaku anggota dan interaksinya dengan pihak eksternal.

- d) Nilai legalitas adalah kebijakan atau regulasi yang mendukung kerja sama antar *stakeholder*.
2. *Komunikasi* adalah penyampaian informasi dan pesan dari pihak satu kepada pihak lain untuk menciptakan pemahaman bersama dan membangun koordinasi, yang dilihat dari gejala:
- a) Tingkat pemahaman individu maupun kelompok dalam menyampaikan dan menerima informasi.
 - b) Kualitas hubungan antar pemangku kepentingan melalui kepercayaan dan kerja sama antar pihak.
 - c) Perubahan pola kerja dari hasil komunikasi.
3. *Kepercayaan* adalah suatu perspektif yang dimiliki oleh setiap individu dalam menjalin kerja sama dengan pihak tertentu sehingga tercipta hubungan kemitraan yang harmonis dan berkelanjutan, dilihat dari:
- a) Konsistensi antar pihak dalam memenuhi janji, tanggung jawab, dan komitmen yang telah disepakati dalam kerja sama.
 - b) Transparansi dalam penyampaian informasi terkait pelaksanaan kerja sama.
 - c) Kepedulian dalam menyelesaikan masalah dan masukan *stakeholder* lain.
 - d) Kredibilitas *stakeholder* yang terlibat berdasarkan kompetensi dan kemampuan teknis.
4. *Kebijakan* adalah serangkaian keputusan, peraturan, atau tindakan yang dirancang dan diterapkan oleh otoritas atau lembaga tertentu untuk

mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pengembangan pariwisata, dilihat dari gejala:

- a) Ada atau tidaknya regulasi yang mengatur penyelenggaraan wisata.
- b) *Stakeholder* berperan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

1.9. Argumen Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis karena adanya kekhawatiran terhadap rendahnya pendapatan daerah Kabupaten Rembang pada sektor pariwisata. Berdasarkan laporan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah tahun 2024, Kabupaten Rembang menempati posisi nomor sembilan pada provinsi Jawa Tengah dari penerimaan sektor wisata. Padahal, jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Rembang termasuk yang terbanyak pada tahun 2024, akan tetapi pendapatan dari sektor wisata masih sangat minim. Khususnya pada sektor pariwisata alam, yaitu pantai yang menempati posisi tertinggi kunjungan wisatawan di Kabupaten Rembang. Salah satunya, yaitu Pantai Pasir Putih Wates yang memiliki kunjungan wisatawan terbanyak kedua di Kabupaten Rembang. Namun, di dalam pengembangannya, Pantai Pasir Putih Wates ini masih mengalami berbagai permasalahan, seperti kerusakan beberapa fasilitas pendukung wisata dan kurangnya sumber daya manusia pengelola Pantai Pasir Putih Wates.

Penulis berpendapat bahwa dalam rangka menemukan solusi yang tepat untuk menangani permasalahan dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang, keterlibatan para *stakeholder* memegang peranan penting dalam mendukung upaya pengembangannya. *Stakeholder* memiliki potensi

strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan komunitas dalam mengatasi permasalahan pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates secara lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis *stakeholder* dan perannya di dalam upaya pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang.

1.10. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Mengacu pada definisi tersebut, terdapat empat elemen utama yang menjadi perhatian dalam metode penelitian, yaitu prosedur ilmiah yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat yang dihasilkan dari proses penelitian tersebut. Pertama, pendekatan ilmiah di dalam penelitian yang merujuk pada pelaksanaan kegiatan berlandaskan pada prinsip-prinsip keilmuan, yaitu rasionalitas, empirisme, dan sistematika. Kedua, rasional yang berarti bahwa proses penelitian dilakukan melalui cara-cara logis dan dapat diterima oleh akal sehat sehingga dapat dijelaskan melalui penalaran ilmiah. Ketiga, empiris menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan dapat diamati dan diverifikasi melalui indra manusia, memungkinkan pihak lain untuk mengamati dan menilai validitas proses tersebut. Hal ini berbeda dengan pendekatan non-ilmiah seperti penggunaan jasa paranormal dalam mencari objek yang hilang atau melacak pelaku kejahatan, yang tidak dapat dibuktikan secara empiris. Sementara itu, sistematis mengacu pada penggunaan tahapan atau langkah-langkah yang terstruktur dan logis dalam

pelaksanaan penelitian, sehingga menghasilkan proses yang tertib dan dapat ditelusuri (Sugiyono, 2013:2).

Metode penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Abubakar (2020:2), merupakan seperangkat prosedur ilmiah yang digunakan untuk menelaah dan menyelidiki suatu permasalahan melalui langkah-langkah sistematis yang dirancang secara cermat dan terencana. Proses ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta interpretasi data secara objektif dan rasional. Tujuan utama dari metode penelitian adalah memecahkan persoalan yang dikaji atau menguji kebenaran suatu hipotesis sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang sah dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan manusia. Sejalan dengan itu, Creswell (2016:22) mendefinisikan metode penelitian sebagai seperangkat strategi atau pendekatan yang digunakan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data dalam rangka memahami suatu fenomena atau isu yang diteliti.

Menurut para ahli tersebut, metode penelitian didefinisikan sebagai strategi ilmiah yang dilakukan secara terorganisir, logis, dan berdasarkan bukti untuk mengumpulkan informasi yang relevan, yang membantu dalam memahami, menganalisis, dan mengatasi suatu masalah tertentu. Prosedur ini terdiri dari beberapa fase terorganisir, termasuk pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan secara objektif, rasional, dan sistematis. Oleh karena itu, metode penelitian tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan sistematis untuk melaksanakan penelitian, tetapi juga sebagai alat penting untuk menghasilkan

pengetahuan ilmiah yang dapat diandalkan dan secara signifikan membantu kemajuan ilmu pengetahuan serta penyelesaian masalah dunia nyata.

1.10.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Mengacu pada Sugiyono (2013:9), pendekatan kualitatif memosisikan peneliti sebagai instrumen utama yang mengamati objek dalam konteks alamiah tanpa melakukan intervensi terhadap lingkungan maupun variabel penelitian. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara induktif untuk menafsirkan pola-pola yang muncul di lapangan. Validitas temuan diperkuat melalui teknik triangulasi dengan memadukan beragam sumber dan metode. Pendekatan ini menitikberatkan pada pendalaman makna suatu fenomena ketimbang generalisasi. Sejalan dengan pandangan Bogdan dan Biklen dalam Abubakar (2021:11–12), penelitian kualitatif beroperasi dalam kondisi natural dan menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, serta lebih menekankan proses daripada hasil akhir. Adapun metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena, fakta, atau kondisi secara sistematis, faktual, dan akurat tanpa berupaya menguji hipotesis atau menganalisis hubungan antar variabel (Hardani dkk., 2020). Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pemaparan mendalam mengenai realitas di lapangan sebagaimana adanya.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, metode deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang dirancang untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena melalui penggalan data secara intensif dan naturalistik. Pendekatan ini berorientasi pada pemaknaan serta penyajian deskripsi yang utuh

dan komprehensif mengenai kondisi empiris yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif kualitatif dipilih karena mampu memberikan representasi yang kaya dan mendalam mengenai dinamika peran pemangku kepentingan dalam proses pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap interaksi, kepentingan, dan kontribusi tiap aktor secara lebih holistik sesuai dengan realitas lapangan.

1.10.2. Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian merupakan tempat yang akan digunakan untuk sebuah penelitian dengan tujuan memperoleh data yang akurat (Sugiyono, 2013:292). Di dalam penelitian ini, akan dilakukan di destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates, Desa Tasikharjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada masih banyaknya masalah di dalam pengelolaan Pantai Pasir Putih Wates dan masih rendahnya pendapatan Kabupaten Rembang dari sektor pariwisata, yaitu pada posisi nomor 9 di Jawa Tengah.

1.10.3. Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian merujuk pada peristiwa, kejadian, atau keadaan yang menjadi fokus utama suatu penelitian. Dalam penelitian ini, fenomena yang diteliti disajikan dalam format tabel. Tabel di bawah ini menampilkan fenomena penelitian yang digunakan:

Tabel 1.6 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati	Informan
Identifikasi <i>Stakeholder</i>	<i>Stakeholder</i> Primer	1. <i>Stakeholder</i> yang memiliki pengaruh langsung dalam	1. Dinas Kebudayaan dan

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati	Informan
		pengembangan pariwisata. 2. <i>Stakeholder</i> yang berperan aktif dalam pengembangan pariwisata. 3. <i>Stakeholder</i> yang terkena dampak langsung, baik itu positif maupun negatif.	Pariwisata Kabupaten Rembang 2. Pengelola Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates
	Stakeholder Kunci	1. <i>Stakeholder</i> memiliki kepentingan dan kewenangan besar dalam pengelolaan pariwisata. 2. <i>Stakeholder</i> yang mempunyai kewenangan legal dalam pengambilan keputusan. 3. <i>Stakeholder</i> yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan program.	
	Stakeholder Sekunder	1. <i>Stakeholder</i> memiliki kepedulian besar dalam pengelolaan pariwisata. 2. <i>Satekholder</i> tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap pengembangan pariwisata.	
Peran <i>Stakeholder</i>	<i>Policy Creator</i>	1. <i>Stakeholder</i> yang memiliki kewenangan dalam merancang program serta mengambil keputusan kebijakan. 2. <i>Stakeholder</i> yang berperan untuk mengidentifikasi fenomena dan pemilihan alternatif terbaik untuk mengatasi masalah yang dihadapi.	

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati	Informan
	Koordinator	1. <i>Stakeholder</i> yang memiliki tugas untuk mengoordinasikan <i>stakeholder</i> lain (koordinator utama). 2. <i>Stakeholder</i> yang mengakomodasi kebutuhan dalam pengelolaan pariwisata. 3. <i>Stakeholder</i> yang berperan dalam memberikan arahan dan mengintegrasikan pengelolaan sumber daya yang tersedia.	
	Fasilitator	1. <i>Stakeholder</i> yang memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan dalam proses pengembangan pariwisata. 2. <i>Stakeholder</i> yang berperan memberikan informasi terkait pengelolaan pariwisata.	
	Implementor	<i>Stakeholder</i> yang terlibat sebagai pelaksana pengembangan pariwisata.	
	Akselerator	1. <i>Stakeholder</i> yang memiliki peran dalam mempercepat pencapaian tujuan pengembangan pariwisata. 2. <i>Stakeholder</i> berkontribusi dalam mempercepat waktu pelaksanaan pengelolaan pariwisata.	
Faktor Pendukung dan Penghambat	Nilai	1. Nilai individu, yaitu prinsip yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tindakan dan mengambil keputusan.	

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati	Informan
Peran <i>Stakeholder</i>		2. Nilai profesionalitas adalah kemampuan dan komitmen individu dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya. 3. Nilai organisasi adalah prinsip yang mengatur perilaku anggota dan interaksinya dengan pihak eksternal. 4. Nilai legalitas adalah kebijakan atau regulasi yang mendukung kerja sama antar <i>stakeholder</i>.	
	Komunikasi	1. Tingkat pemahaman individu maupun kelompok dalam menyampaikan dan menerima informasi. 2. Kualitas hubungan antar pemangku kepentingan melalui kepercayaan dan kerja sama antar pihak. 3. Perubahan pola kerja dari hasil komunikasi.	
	Kepercayaan	1. Konsistensi antar pihak dalam memenuhi janji, tanggung jawab, dan komitmen yang telah disepakati dalam kerja sama. 2. Transparansi dalam penyampaian informasi terkait pelaksanaan kerja sama. 3. Kepedulian dalam menyelesaikan masalah dan masukan <i>stakeholder</i> lain. 4. Kredibilitas <i>stakeholder</i> yang terlibat berdasarkan kompetensi dan kemampuan teknis.	

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati	Informan
	Kebijakan	1. Ada atau tidaknya regulasi yang mengatur penyelenggaraan wisata. 2. <i>Stakeholder</i> berperan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.	

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

1.10.4. Subjek Penelitian

Metode *snowball* sampling digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan informan secara bertahap. Menurut Sugiyono (2013:85–86), teknik ini diawali dengan pemilihan satu atau beberapa informan kunci, kemudian berkembang mengikuti rekomendasi informan sebelumnya, layaknya bola salju yang terus membesar. Apabila informasi dari informan awal belum dianggap memadai, peneliti akan menambah informan lain yang dinilai memiliki pemahaman lebih relevan atau dapat melengkapi data yang telah diperoleh. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga jumlah informan bertambah sesuai kebutuhan data penelitian. Pada penelitian ini, digunakan teknik *snowball sampling* sehingga informan di dalam penelitian dapat diketahui secara lebih spesifik.

Adapun informan di dalam penelitian ini, yaitu *stakeholders* yang terlibat langsung serta mengetahui secara mendalam tentang pengembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates di Kabupaten Rembang. Penentuan informan di dalam penelitian ini, yaitu informan kunci, nantinya pada saat penelitian akan berkembang dengan informasi dari informan kunci tersebut. Informan kunci di dalam penelitian ini adalah Pengelola Pantai Pasir Putih Wates dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.

1.10.5. Jenis Data

Jenis data merupakan klasifikasi atau bentuk informasi yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Secara umum, data dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif (Sugiyono, 2018:7–8). Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang tersusun atas narasi berupa teks, tuturan, simbol, maupun representasi lain yang menggambarkan pengalaman individu, tindakan, serta peristiwa dalam konteks sosial yang diteliti.

1.10.6. Sumber Data

Langkah penting dalam proses penelitian adalah pengumpulan data. Secara umum, data dapat diperoleh dari dua jenis sumber dasar, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2013:225). Informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli yang secara langsung relevan dengan variabel penelitian disebut sebagai data primer. Pengumpulan data primer dilakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan proyek penelitian. Di sisi lain, data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari bahan-bahan yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak ketiga, artinya peneliti tidak mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Kesimpulan yang dihasilkan dari data primer biasanya dilengkapi, dirujuk, atau didukung oleh data sekunder.

a) Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti survei, wawancara, dan pengamatan terhadap barang, acara, atau aktivitas tertentu, disebut sebagai data primer. Pengamatan lapangan langsung dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku

kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Pantai Pasir Putih Wates digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam studi ini. Sumber informasi meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, anggota masyarakat lokal, pelaku usaha di industri pariwisata, dan pihak lain yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh melalui sumber eksternal, bukan dikumpulkan secara langsung oleh para peneliti sendiri. Sumber data ini terdiri dari berbagai jenis dokumen, catatan, bukti tertulis, dan arsip yang saat ini dapat diakses, termasuk materi yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Data sekunder dalam penelitian ini, terdapat dokumen resmi, undang-undang dan peraturan, temuan penelitian sebelumnya, tesis, disertasi, artikel jurnal, artikel berita, serta informasi tambahan yang diperoleh dari sumber *online* yang berkaitan dengan studi tentang perkembangan destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates.

1.10.7. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian, karena seluruh proses analisis sangat bergantung pada ketepatan data yang diperoleh. Sugiyono (2013:225) menyoroti bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan di lingkungan nyata, mengandalkan sumber data primer, dan menggunakan metode yang menekankan keterlibatan aktif peneliti. Metode-metode tersebut meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis

dokumen. Dalam penelitian ini, ketiga metode tersebut digunakan sebagai alat utama untuk mengumpulkan informasi penting dan rinci tentang objek penelitian.

a) Observasi

Observasi dilakukan pada tahap awal penelitian untuk mempermudah pelaksanaan wawancara pada tahapan berikutnya. Proses ini memberikan dasar observasi yang memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan yang lebih terarah, serta menyinkronkan realitas di lapangan dengan pertanyaan yang akan diajukan. Observasi merupakan langkah pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan langsung untuk objek yang diteliti. Instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi, yang berisi daftar aspek atau aktivitas yang perlu diamati, serta sistem pencatatan tertentu yang memungkinkan peneliti mendokumentasikan kondisi atau fenomena secara sistematis. Melalui observasi ini, peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks data dari berbagai perspektif. Di dalam observasi, peneliti juga akan merekam informasi dan memotret fenomena yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Pantai Pasir Putih Wates.

b) Wawancara

Tahapan selanjutnya setelah melakukan observasi lapangan adalah melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan oleh informan selama proses wawancara dengan kondisi yang telah diamati sebelumnya. Wawancara berfungsi sebagai metode untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, menggunakan wawancara dengan pedoman terpimpin (*interview guide*), yakni wawancara yang dilaksanakan

berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun secara lengkap dan sistematis. Instrumen wawancara mencakup dua jenis kuesioner, (1) kuesioner terbuka yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan responden menjawab secara bebas sesuai sudut pandang dan pengetahuan mereka; dan kedua, kuesioner langsung yang berisi pertanyaan terstruktur yang menuntut jawaban lebih spesifik sesuai fokus penelitian. (2) Kuesioner langsung mengharuskan responden atau objek penelitian untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan diri mereka. Wawancara yang dilakukan bersifat tidak terstruktur, yang berarti bahwa peneliti dapat mengajukan pertanyaan secara lebih fleksibel, dengan arah yang terbuka, namun tetap terfokus sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam tanpa terikat pada struktur yang kaku. Wawancara pertama dilakukan dengan Ketua Pengelola Pantai Pasir Putih Wates, untuk menentukan informan berikutnya. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik *snowball* untuk memilih informan lanjutan.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi berperan sebagai pelengkap dari teknik observasi dan wawancara dalam proses pengumpulan data. Pada tahapan ini, peneliti menghimpun berbagai dokumen yang memiliki relevansi dengan proses pengelolaan dan pengembangan Pantai Pasir Putih Wates, seperti laporan kegiatan, notulen rapat, serta dokumen kebijakan yang mendasari penyelenggaraan program pengembangan pariwisata. Dokumentasi tersebut berfungsi menyediakan bukti empiris yang dapat memperkuat temuan dari

observasi dan wawancara, sehingga meningkatkan akurasi serta kredibilitas data penelitian. Proses dokumentasi dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan, verifikasi, dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang dianggap signifikan, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai *stakeholder* serta peran mereka dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Rembang

1.10.8. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan suatu proses penting yang bertujuan untuk menyusun informasi secara terorganisir, didasarkan pada wawasan yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan berbagai jenis dokumen. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, pemecahan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, pengaturan ulang informasi menggunakan metode sintesis, identifikasi pola tematik, dan penentuan faktor-faktor yang penting untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, analisis data bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami bagi peneliti dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (Sugiyono, 2013:244).

Sugiyono (2013:245) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif pada dasarnya bersifat induktif, dimulai dengan pengumpulan data empiris dari lapangan, yang kemudian digunakan untuk merumuskan hipotesis awal. Hipotesis-hipotesis ini kemudian diuji dengan mengumpulkan data tambahan secara berulang hingga diperoleh hasil yang dapat diandalkan. Jika konsistensi terjaga, terutama setelah melalui uji triangulasi, hipotesis-hipotesis tersebut dapat berkembang menjadi teori.

Pada penelitian ini, metode interpretasi data didasarkan pada kerangka analisis Miles dan Huberman sebagaimana dirujuk oleh Sugiyono (2013:246–253). Model analisis ini menegaskan bahwa proses pengolahan data kualitatif berlangsung secara simultan melalui tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Ketiga tahapan tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan dilakukan secara berulang dan saling berkaitan sepanjang keseluruhan proses penelitian. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa temuan penelitian memiliki tingkat validitas, konsistensi, dan keterandalan yang kuat.

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif, yang mencakup proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, serta pengabstraksian data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Langkah ini dilakukan secara berkesinambungan selama seluruh rangkaian penelitian, mulai dari kegiatan pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir. Tujuan utama dari proses ini adalah menghasilkan data yang tertata, relevan, dan bermakna sehingga dapat mendukung tahapan analisis berikutnya secara lebih efektif.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengorganisasikan informasi secara sistematis ke dalam berbagai bentuk seperti matriks, diagram, grafik, ringkasan deskriptif, maupun pemetaan hubungan antar kategori agar mudah dipahami. Penyajian yang terstruktur

dan informatif menjadi elemen penting dalam analisis data kualitatif yang berkualitas. Melalui tahap ini, peneliti dapat mengenali pola-pola tertentu, menarik makna dari temuan, serta menentukan langkah analitis selanjutnya secara lebih terarah.

c) Penarikan Kesimpulan

Setelah proses penyajian dan analisis data dilakukan secara komprehensif, tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil reduksi data dan tetap mengacu pada perumusan masalah serta tujuan penelitian. Data yang telah tersusun secara sistematis kemudian dikaitkan dan dibandingkan satu sama lain sehingga memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan temuan utama yang secara langsung menjawab permasalahan penelitian.

1.10.9. Kualitas Data

Sugiyono (2013:267), menyatakan bahwa data dalam penelitian kualitatif dianggap sah jika informasi yang dikumpulkan dan disajikan oleh peneliti konsisten dengan kondisi nyata di lapangan. Untuk memastikan kualitas data dalam penelitian ini, pendekatan validasi data dalam bentuk triangulasi diterapkan. William Wiersma, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2013:273), menyatakan bahwa triangulasi adalah proses verifikasi data melalui penggunaan sumber, metodologi, dan waktu pengumpulan yang beragam. Selain itu, Sugiyono (2013:273–275) mendefinisikan triangulasi menjadi tiga jenis yang digunakan untuk meningkatkan keandalan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, sebagai berikut.

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Tujuannya adalah memastikan bahwa data tersebut konsisten, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknis melibatkan verifikasi data dari satu sumber menggunakan berbagai teknik, termasuk pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, untuk memastikan bahwa informasi tersebut konsisten.

c) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan memeriksa data yang sama pada waktu yang berbeda. Metode yang digunakan, seperti wawancara, pengamatan, atau dokumentasi, tetap sama, tetapi data dikumpulkan pada waktu yang berbeda, sehingga waktu menjadi faktor penting dalam memverifikasi kredibilitas data.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber dengan mengombinasikan beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga keakuratan dan kelengkapan informasi dapat terjamin. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni dengan mengintegrasikan temuan wawancara dan kajian literatur ke dalam satu rangkaian analisis yang menyeluruh. Wawancara memberikan gambaran empiris terkait pengalaman dan pandangan para informan yang terlibat secara langsung, sedangkan studi kepustakaan menyediakan kerangka teoritik yang memperluas konteks analisis. Seluruh data yang berhasil dihimpun kemudian diorganisasi, diklasifikasikan, dan

dibandingkan untuk mengidentifikasi titik temu maupun perbedaan antar informan. Melalui proses tersebut, penelitian menghasilkan kesimpulan yang dibangun berdasarkan sintesis dari seluruh data yang telah dianalisis secara sistematis.